DISERTASI

EFEK INFLASI, PENGELUARAN PEMERINTAH, KREDIT PERBANKAN, DAN UPAH MINIMUM TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DI INDONESIA (2000-2020)

THE INFLATION EFFECTS, GOVERNMENT EXPENSES, BANKING LOANS, AND MINIMUM PAYMENT TOWARDS EMPLOYMENT ABSORPTION IN INDONESIA (2000-2020)

WISDA ZULAEHA SUWARDI
P0500316410

PROGRAM DOKTOR ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022

DISERTASI

EFEK INFLASI, PENGELUARAN PEMERINTAH, KREDIT PERBANKAN, DAN UPAH MINIMUM TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DI INDONESIA (2000-2020)

THE INFLATION EFFECTS, GOVERNMENT EXPENSES, BANKING LOANS, AND MINIMUM PAYMENT TOWARDS EMPLOYMENT ABSORPTION IN INDONESIA (2000-2020)

Disertasi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Doctor
Program Studi Doctor Ilmu Ekonomi

Disusun dan diajukan oleh :
WISDA ZULAEHA SUWARDI
P0500316410

Kepada

PROGRAM DOKTOR ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022

PENGESAHAN

EFEK INFLASI, PENGELUARAN PEMERINTAH, KREDIT PERBANKAN DAN UPAH MINIMUM TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DI INDONESIA (2000-2020)

THE INFLATION EFFECTS, GOVERNMENT EXPENSES, BANKING LOANS, AND MINIMUM PAYMENT TOWARDS EMPLOYMENT ABSORPTION IN INDONESIA (2000-2020)

Disusun dan diajukan oleh

WISDA ZULAEHA SUWARDI

P0500316410

Telah diperiksa dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka penyelesaian studi Program Doktor Ilmu Ekonomi

Pada tanggal 19 Januari 2022

dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Promotor,

Prof. Dr. Basri Hasanuddin, MA
NIP. 19560722 198702 1 001

Co-Promotor 1

Dr. Anas Iswanto Anwar, SE.,MA.,CWM
NIP. 19630516 199003 1 001

Co-Promotor 2

Dr.Madris, DPS.,S.E.,M.Si
NIP. 19601231 198811 1 002

Ketua Program Studi
Program Doktor Ilmu Ekonomi

Dr. Anas Iswanto Anwar., SE., MA.,CWM
NIP. 19630516 1999003 1 001

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Prof.Dr. Abd. Rahman Kadir., SE., M.Si.,CWM
NIP. 19640205 199810 1 001

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Wisdah Zulaeha Suwardi
NIM	: P0500316410
Jurusan / Program Studi	: Ilmu Ekonomi

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa, disertasi yang berjudul :

EFEK INFLASI, PENGELUARAN PEMERINTAH, KREDIT PERBANKAN, DAN UPAH MINIMUM TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DI INDONESIA (2000-2020)

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah disertasi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah di ajukan/ditulis/diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalm sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari, ternyata didalam naskah disertasi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur ciptakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan di proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, Desember 2021
Yang membuat pernyataan

Wisdah Zulaeha Suwardi

PRAKATA

Dengan memanjatkan Puja, Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, atas segala Rahmat dan Karunia-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Disertasi ini yang berjudul: **"EFEK INFLASI,PENGELUARAN PEMERINTAH,KREDIT PERBANKAN,DAN UPAH MINIMUM TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DI INDONESIA"** dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncakan. Aamiin

Adapun ide gagasan yang melatarbelakangi tulisan ini karena adanya phenomena penyerapan tenaga kerja yang menurut penulis layak untuk dikaji dan dianalisis. Penulis ingin merekomendasikan dan menyumbangkan konsep, ide dan gagasan dari tulisan ini dengan beberapa harapan, yaitu : inflasi yang mampu ditekan agar daya beli masyarakat meningkat dan pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, upah yang mampu menyerap tenaga kerja yang lebih banyak, penggunaan kredit perbankan yang tepat sasaran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah yang tepat sasaran, pertumbuhan ekonomi yang efektif, dan penyerapan tenaga kerja yang meningkat setiap tahunnya.

Penulis menyadari bahwa disertasi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, namun disinilah bukti keterbatasan kemampuan Penulis sebagai manusia biasa. Oleh karena itu kritik dan saran untuk perbaikan dan penyempurnaan disertasi ini sangat Penulis harapkan

Ucapan terimakasih yang tak terhingga dan setulus-tulusnya, Penulis sampaikan kepada **Prof. Dr. Basri Hasanuddin, MA,** selaku Promotor; **Dr.Anas Iswanto Anwar,SE.,MA.,CWM** selaku Ko-Promotor 1 dan **Dr.Madris, DPS.,SE.,M.Si** selaku Ko-Promotor 2, dengan segala ketulusan dan keihlasan yang tidak mengenal waktu dan tempat untuk memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan serta kecermatan dalam memberikan petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada Penulis sehingga penulisan disertasi ini dapat dirampungkan.

Selanjutnya, bahwa dengan selesainya penulisan disertasi dan sekaligus selesainya program Doktor Ilmu Ekonomi di Universitas Hasanuddin, tidak lepas dari berbagi bantuan, baik moril maupun materil, dorongan semangat dan doa dari semua pihak, sehingga izinkan Penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan terimakasih yang tulus dan ihklas, khususnya kepada :

1. **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, MA.** selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. **Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si.** selaku Dekan Fakultas Ilmu Ekonomi Universitas Hasanuddin dan Jajaran Pimpinan Fakultas Ilmu Ekonomi UNHAS, serta seluruh Guru Besar, dan dosen Penulis pada Fakultas Ilmu Ekonomi yang telah memberikan izin, kesempatan, fasilitas dan terutama ilmu pengetahuan yang sangat berharga dan tak ternilai kepada Penulis selama mengikuti pendidikan Program Doktoral (S3) Pascasarjana Universitas Hasanuddin;
3. **Dr. Anas Iswanto Anwar, SE., MA.,CWM** selaku Ketua Program Studi (KPS) Program Doktor Ilmu Ekonomi Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
4. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh Tim Penguji dan Penilai, baik Penguji dan Penilai eksternal maupun internal yaitu: Bapak **Dr. Chaerul Anam,SE.,M.,Si** Sebagai Penguji dan penilai eksternal, Bapak **Prof, Dr. I Made Benyamin, M.Ec** Sebagai Penguji dan penilai Internal, bapak **Prof, Dr. Hamid Paddu, SE.,MA** Sebagai Penguji dan penilai Internal, Ibu **Dr. Sry Undai Nurbayani,SE.,M.Si** Sebagai Penguji dan penilai Internal, Bapak **Dr. Hamrullah,SE.,M.Si** Sebagai Penguji dan penilai Internal, Ibu **Dr. Aini Indrijawati, SE.,Ak.,M.Si.,CA** sebagai Sebagai Penguji dan penilai Internal, atas segala perhatian, pertanyaan, sanggahan, saran, masukan maupun kritikan dengan segala pengetahuan dan motivasinya selama proses ujian berlangsung demi penyempurnaan disertasi ini.
5. Teristimewa, ucapan terimakasih setulus-tulusnya, yang tak terhingga dan do'a terus menerus tercurahkan kepada Allah SWT, untuk Ayahanda tercinta Penulis **"Suwardi,S.,Ip** adalah sosok pemimpin yang Tangguh serta sering memotivasi penulis untuk terus menjadi yang terbaik dan tetap selalu dijalan yang benar, serta ibu tercinta Penulis **"Hj.Dra.Adila"** atas kasih sayang, perjuangannya melahirkan, membesarkan dan mendidik Penulis dengan penuh kasih sayangnya, ketulusan , kelembutan bahasa, yang tak kenal lelah, karena doa dan harapan untuk mempunyai anak yang bisa meraih gelar akademik tertinggi (Doktor). Sehingga penulis terus berjuang dan berusaha dengan berbagai pengorbanan untuk menunaikan harapan kedua orang tua Penulis.
6. Ketua STIE Tri Dharma Nusantara Makassar, Dr. Ir. H. Andi Entong C., M.Si. dan Ibu Hj. Andi Dorawati Ishak, S.E., M.Si. yang telah memberikan izin untuk melanjutkan pendidikan, serta memberikan dukungan yang luar biasa kepada penulis.

7. Seluruh staf dan pengajar STIE Tri Dharma Nusantara yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis selama menempuh pendidikan. Ibu Muhibah, ibu A. Rifqah, Bapak Indra, Ibu Ramlah, Ibu Muliati. Terimakasih atas support selama penulis menempuh Pendidikan.
8. Rekan-rekan Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Hasanuddin, terkhusus angkatan 2016 atas dukungan dan bantuan selama menempuh pendidikan Ibu iiz, Ibu Heny, Ibu Lasty, Bapak Jamal,Bapak Ruslan Ibu Lena dan semua Angkatan 2016 yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Selain itu, rekan-rekan lintas angkatan, mulai dari angkatan 2014, 2015, 2017, 2018, dan 2019 yang berinteraksi dan berbagi informasi dengan penulis.
9. Suami tercinta Abd. Malik Amin. yang begitu sabar dan ikhlas mendampingi serta memberikan dukungan tak terhingga kepada penulis. Teristimewa kepada anakku Nadzifa Fathina Malik dan Ariqah Maezurra Malik yang saya kandung selama menempuh pendidikan program S3 dan menemani proses pendidikan hingga selesai. Terima kasih atas kesabaran dan maaf atas waktu yang tersita.
10. Saudara saya Amar Maruf yang selama imembantu penulis dalam menemani setiap proses selama penulis menempuh Pendidikan.
11. Keluarga tersayang Bapak H.Amin Made SE. dan Ibu Hj.Rosmawati terimakasih atas dukungan moril, spirit dan doanya. Semoga Allah swt senantiasa membalasnya pula dengan kebaikan-kebaikan. Aamiin
12. Seluruh pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang senantiasa memberikan doa, bantuan, dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung sepanjang proses penyelesaian studi.

Akhirnya Penulis mengharap semoga dengan hadirnya Disertasi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terkhusus dalam bidang ilmu Ekonomi di negara Indonesia, semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa memberkahi dan merahmati kita sekalian dalam setiap aktivitas keseharian sebagai bentuk ibadah di sisih-Nya.

Aamiin…

Makassar, Desember 2021

Wisda Zulaeha Suwardi

ABSTRAK

WISDA ZULAEHA SUWARDI. *Efek Inflasi, Pengeluaran Pemerintah, Kredit Perbankan, dan Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Indonesia (2000-2020).* (Promotor oleh Basri Hasanuddin; Co-Promotor: Anas Iswanto Anwar, Madris DPS)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh inflasi terhadap penyerapan tenaga kerja baik secara langsung maupun melalui pertumbuhan ekonomi; pengaruh upah terhadap penyerapan tenaga kerja baik secara langsung maupun melalui pertumbuhan ekonomi; pengaruh kredit bank terhadap penyerapan tenaga kerja baik secara langsung maupun melalui pertumbuhan ekonomi;dan pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja baik secara langsung maupun melalui pertumbuhan ekonomi.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Data diolah menggunakan Aplikasi E-Views. Analisis utama yang dilakukan adalah untuk menguji konstruk jalur apakah teruji secara empiris atau tidak. Analisis selanjutnya dilakukan untuk mencari pengaruh langsung dan tidak langsung seperangkat variabel bebas terhadap variabel terikat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja; inflasi berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja secara tidak langsung melalui PDB. Upah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja; upah berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja melalui PDB. Kredit bank berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja; kredit bank berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja melalui PDB. Pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja; pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif terhdap penyerapan tenaga kerja melalui PDB. Pertunbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

Kata Kunci: Inflasi, upah minimum, kredit perbankan, PDB, penyerapan tenaga kerja

ABSTRACT

WISDA ZULAEHA SUWARDI.*Effects of Inflation, Government Expenditure, Banking Credit, and Minimum Wage on Labor Absorption in Indonesia (2000-2020).*(Promoter by Basri Hasanuddin; Co-Promoter: Anas Iswanto Anwar, Madris DPS)

This study aims to analyze the effect of inflation on employment, either directly or through economic growth; the effect of wages on employment, either directly or through economic growth; the effect of bank credit on employment, either directly or through economic growth; and the effect of government spending on employment, either directly or through economic growth.

This research is a quantitative research. The data is processed using the E-Views Application. The main analysis carried out is to test the path construct whether it is empirically tested or not. Further analysis was carried out to find out the direct and indirect effects of a set of independent variables on the dependent variable.

The results showed that inflation had no effect on employment; inflation affects employment indirectly through GDP. Wages have a negative and significant effect on employment; wages have a positive effect on employment through GDP. Bank credit has a negative and significant effect on employment; bank credit has a positive effect on employment through GDP. Government spending has a positive and significant effect on employment; government spending has a negative effect on employment through GDP. Economic growth has a positive and significant effect on employment.

Keywords: Inflation, minimum wage, bank credit, GDP, employment

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL **i**

HALAMAN PENGESAHAN **iii**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN **iv**

PRAKATA **v**

ABSTRAK **vii**

ABSTRACT **viii**

DAFTAR ISI **ix**

DAFTAR TABEL **xii**

DAFTAR GAMBAR **xiii**

DAFTAR LAMPIRAN **xiv**

DAFTAR SINGKATAN/SIMBOL **xv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 16

C. Tujuan Penelitian 17

D. Kegunaan Penelitian 17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **19**

A. Tinjauan Teori dan Konsep 19

1. Pandangan Teoretis tentang Penyerapan Tenaga Kerja 19
2. Pandangan Teoretis tentang Produk domestik bruto 23
3. Pandangan Teoretis tentang Inflasi 28
4. Pandangan Teoretis tentang Upah Minimum 31
5. Pandangan Teoretis tentang Kredit perbankan 46
6. Pandangan Teoretis tentang Pengeluaran Pemerintah 53

B. Keterkaitan Antarvariabel 58

1. Hubungan Teoritis Inflasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja 58
2. Hubungan Teoritis Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja. 60
3. Hubungan Teoritis Kredit Perbankan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja 63

4. Hubungan Teoritis Pengeluaran Pemerintah terhadap Penyerapan Penyerapan Tenaga Kerja 65
5. Hubungan Teoritis Produk Domestik Bruto terhadap Penyerapan Tenaga Kerja 66
C. Penelitian Terdahulu 69
BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS 71
A. Kerangka Konseptual 71
B. Hipotesis 78
BAB IV METODE PENELITIAN 80
A. Rancangan Penelitian 80
B. Jenis Dan Sumber Data 80
C. Teknik Analisis Data 80
D. Defnisi Operasional 85
BAB V ANALISIS HASIL PENELITIAN 87
A. Statistik Deskriptif 87
1. Penyerapan Tenaga Kerja 87
2. Produk Domestik Bruto 93
3. Inflasi 97
4. Upah Minimum 100
5. Kredit Perbankan 103
6. Pengeluaran Pemerintah 106
B. Hasil Analisis Statistik 109
1. Pengaruh Inflasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Baik Secara Langsung Maupun tidak Langsung Melalui Produk Domestik Bruto 115
2. Pengaruh Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Baik Secara Langsung Maupun tidak Langsung Melalui Produk Domestik Bruto 116
3. Pengaruh Kredit Perbankan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Baik Secara Langsung Maupun tidak Langsung Melalui Produk Domestik Bruto 118

4. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Baik Secara Langsung Maupun tidak Langsung Melalui PDB Harga Konstan 119
5. Pengaruh Produk Domestik Bruto terhadap Penyerapan Tenaga Kerja 121
C. Model Persamaan Simultan 121
BAB VI PEMBAHASAN DAN TEMUAN PENELITIAN 123
A. Pembahasan Penelitian 123
1. Pengaruh Inflasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Baik Secara Langsung Maupun tidak Langsung Melalui Produk Domestik Bruto 123
2. Pengaruh Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Baik Secara Langsung Maupun tidak Langsung Melalui Produk Domestik Bruto 128
3. Pengaruh Kredit Perbankan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Baik Secara Langsung Maupun tidak Langsung Melalui Produk Domestik Bruto 139
4. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Melalui Produk Domestik Bruto 149
5. Pengaruh Produk Domestik Bruto Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja 156
B. Temuan Penelitian 158
BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 160
A. Kesimpulan 160
B. Saran 162
DAFTAR PUSTAKA 164
LAMPIRAN 174

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Trend Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia 93
Tabel 2. Trend Produk Domestik Bruto Tahun 2000-2020 96
Tabel 3.Trend Inflasi Tahun 2000-2020 100
Tabel 4.Trend Upah Minimum Tahun 2000-2020 103
Tabel 5.Trend Kredit Perbankan Tahun 2000-2020 105
Tabel 6. Trend Pengeluaran Pemerintah 2000-2020 109
Tabel 7. Hasil Regresi *Direct Effect* Variabel-Variabel yang Diteliti 111
Tabel 8. Uji Auto-Korelasi Breusch-Godfrey 112
Tabel 9. Hasil Estimasi Koefisien Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung baik Variabel Eksogen maupun Variabel Endogen terhadap Variabel Penyerapan Tenaga Kerja (Y_2) 113

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.Kerangka Konseptual 77
Gambar 2. Hasil Analisis Regresi 114

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Matrix Penelitian Terdahulu 175

Lampiran 2. Data Observasi Berdasarkan Variabel yang Diteliti 199

Lampiran 3. Data Observasi yang Sudah di-ln Berdasarkan Variabel yang Diteliti 200

Lampiran 4. Output e-Views 201

Lampiran 5. Hasil Estimasi Koefisien Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung baik Variabel Eksogen maupun Variabel Endogen terhadap Variabel Penyerapan Tenaga Kerja (Y_2) 209

DAFTAR SINGKATAN/SIMBOL

Singkatan/Simbol	Keterangan
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
AP	*Administered Prices*
ASEAN	*Association of Southeast Asian Nations*
BEP	*Break Even Point*
BOS	Bantuan Operasional Sekolah
BPS	Badan Pusat Statistik
CAD	*Computer Aided Design*
CGE	*Computable General Equilibrum*
Covid-19	*Corona Virus Disease-2019*
D.I	Daerah Istimewa
DKI	Daerah Khusus Ibu kota
EROI	*Energy Return on Investmen*
GNP	Gross National Product
HKBN	Hari Besar Keagamaan dan Nasional
IHK	Indeks Harga Konsumen
IRR	*Internal Rate of Return*
K	Kapital
K/L	Kementerian/Lembaga
KHL	Kebutuhan Hidup Layak
L	Labor/Tenaga Kerja
Litbang	Penelitian dan Pengembangan
Ln	Log natural

MI	Madrasah Ibtidiyah
No	Nomor
NPL	Non Performing Loan
NPV	*Net Present Value*
OJK	Otoritas Jasa Keuangan
PAD	Pendapatan Asli Daerah
PDB	Produk Domestik Bruto
PDB	Produk Domestik Regional Bruto
PHK	Pemutusan Hubungan Kerja
PI	*Profitability Index*
PN	Pendapatan Nasional
PNB	Produk Nasional Bruto
R & D	*Research and Development*
RI	Republik Indonesia
SD	Sekolah Dasar
SDM	Sumber Daya Manusia
SISDIKNAS	Sistem Pendidikan Nasional
SIUI	Surat Izi Usaha Industri
SIUP	Surat Izin Usaha Perdagangan
SMA	Sekolah Menengah Atas
SMK	Sekolah Menengah Kejuruan
SMP	Sekolah Menengah Pertama
SOEP	*Socio-Economic Panel*
TDL	Tarif Dasar Listrik

TDP	Tanda Daftar Perusahaan
TPI	Tim Pengendali Inflasi
UKM	Usaha Kecil dan Menengah
UMKM	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
UMP	Upah Minimum Provinsi
UNHAS	Universitas Hasanuddin
UU	Undang-Undang
VF	*Volatile Food*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumber daya manusia merupakan hal utama dalam kegiatan pembangunan. Sumber daya manusia yang terus bertumbuh ini diharapkan mampu menggerakan sektor-sektor perekonomian yang dapat mendorong pembangunan ekonomi. Namun, tingginya jumlah angkatan kerja yang merupakan cerminan dari pertumbuhan sumber daya manusia ini jika tidak dibarengi dengan penciptaan lapangan kerja dapat menciptakan permasalahan pada pasar tenaga kerja. Hal ini tentunya hampir dialami oleh semua negara terkhusus negara berkembang.

Keberhasilan suatu pembangunan ekonomi dipengaruhi oleh faktor produksi. Faktor produksi sering didefenisikan sebagai setiap hal yang diperlukan secara teknis untuk memproduksi suatu barang dan jasa. Faktor-faktor produksi tersebut diantaranya yaitu bahan pokok peralatan gedung, tenaga kerja, mesin dan modal yang secara garis besar dapat dikategorikan menjadi input manusia dan non manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Selain itu, secara yuridis tenaga kerja dilihat sebagai kemampuan yang dimiliki oleh manusia untuk melakukan suatu pekerjaan. Kemampuan ini menyatu dengan orangnya serta tidak dapat dan tidak boleh dipisahkan. Sekaligus ini merupakan hak dan salah satu sumber peghidupan serta harga dirinya yang paling utama dan mutlak. Karenanya tenaga kerja ini diniai. Oleh

karenanya dalam Perundang-Undangan tenaga kerja menyatakan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Mulyadi (2003) juga memberikan defenisi tenaga kerja sebagai penduduk dalam usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu Negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut. Berdasarkan defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah setiap penduduk yang mampu menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan batas usia minimal angkatan kerja yaitu 15 tahun.

Kenaikan jumlah penduduk yang terjadi secara berkala dari waktu ke waktu dapat mendorong maupun menghambat pertumbuhan ekonomi. Jumlah penduduk yang meningkat mengakibatkan meningkatnya jumlah tenaga kerja yang tersedia. Dengan demikian hal ini akan menyebabkan kemampuan produksi suaatu Negara meningkat. Namun disisi lain, besarnya jumlah angka penduduk yang ada pada suatu wilayah juga akan menyebabkan pembangunan ekonomi menjadi terhambat apabila kenaikan yang terjadi tidak seimbang antara kenaikan jumlah penduduk dengan menaikkan kesempatan kerja yang tersedia, maka hal tersebut akan memicu semakin meningkatnya jumlah pengangguran.

Permintaan tenaga kerja atau kebutuhan tenaga kerja dalam suatu perkembangan ekonomi dapat dilihat dari kesempatan kerja (orang yang telah bekerja dari sector atau kebutuhan tenaga kerja merupakan jumlah kesempatan kerja yang tersedia di dalam sistem ekonomi yang dinyatakan dalam jumlah

satuan ornag yang bekerja pada masing-masing sektor untuk melakukan kegiatan produksi. Dalam arti yang lebih luas, kebutuhan ini tidak saja menyangkut jumlahnya, tetapi juga kualitasnya (pendidikan dan keahlian). Karena mereka yang bekerja tidak seluruhnya memiliki jam kerja normal *(full employment)*, maka kebutuhan tenaga kerja dalam analisa-analisa tertentu juga dinyatakan dalam satuan ekivalen pekerja penuh*. (full-time worker equipment)*. Normatif yang digunakan untuk satu ekivalen pekrja penuh adalah 35 jam kerja perminggu,ada yang menggunakan 40 jam kerja perminggu, Karena tiap-tiap sektor biasanya memiliki jumlah jam kerja yang berbeda, dan akan lebih baik lagi bila digunakan normatife yang juga berbeda antar sektor(Simanjuntak. 1998).

Permintaan terhadap tenaga kerja merupakan permintaan turunan *(derived demand)* artinya jika permintaan terhadap suatu barang meningkat maka pengusaha akan menambah tenaga kerja untuk produksinya. Tenaga kerja yang diminta Karena adanya perubahan ekonomi sehingga permintaan pun terus berubah. Pemakaian tenaga kerja juga tergantung pada perusahaan atau industri yang bersangkutan, jika persahaan cenderung padat karya maka pemakaian atau penggunaan tenaga kerja meningkat, namun jika perusahaan cenderung padat modal penggunaan tenaga relatife kecil karena adanya pemakaian mesin sebagai salah satu faktor produksi.

Penyerapan tenaga kerja telah menarik minat para peneliti di dunia, diantaranya Williamson (1971) yang menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi, upah, dan kebijakan pemerintah mampu mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Filipina meskipun tidak signifikan. Lebih spesifik, hasil penelitian Leung & So (2013) menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja dapat ditingkatkan dengan membuat peraturan ketenagakerjaan baru yang lebih sesuai dengan

kepentingan buruh. Tujuannya adalah untuk meningkatkan upah dan kompensasi lainnya bagi para pekerja.

Ardagna (2007) mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja diantaranya peningkatan pekerjaan publik yang dibiayai oleh hutang, upah pekerja sektor publik, tunjangan pengangguran, dan pajak tenaga kerja. Mosler (1997) dalam penelitian membahas mengenai faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja seperti upah, kepemilikan aset sektor swasta dan pengeluaran pemerintah. Selanjutnya Gandelman (2016) dalam tulisannya mengemukakan bahwa kredit bank, pertumbuhan ekonomi, dan upah merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Secara objektif dalam beberapa aspek, studi ini berbeda dengan kajian-kajian terdahulu mengenai penyerapan tenaga kerja di Indonesia jika dikaitkan dengan pengeluaran pemerintah, upah, kredit bank, dan tingkat inflasi baik secara langsung maupun melalui pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi yang dicerminkan oleh pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) diharapkan mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak. Secara umum, PDB di Indonesia cenderung mengalami peningkatan, namun jumlah angkatan kerja yang terserap masih sedikit, dan angka pengangguran juga terus bertambah (Statistik, 2021).

Pertumbuhan ekonomi merupakan kebutuhan fundamental bagi perkembangan suatu Negara. Pertumbuhan ekonomi yang berbanding lurus dengan kesempatan kerja merupakan kondisi ideal yang diharapka, di mana pertumbuhan ekonomi yang meningkat maka dapat dipastikan bahwa kesempatan kerja disuatu negara juga akan semakin meningkat. Pertumbuhan

ekonomi sendiri secara definisi merupakan sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang dapat terjadi secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu.

Pada era ekonomi klasik teori pertumbuhan ekonomi Adam Smith (1776) berpendapat bahwa perekonomian akan tumbuh dan berkembang jika ada pertambahan penduduk yang akan memperluas pasar serta mendorong spesialisasi. Sebagai akibat dari spesialisasi yang terjadi,maka tingkat kegiatan ekonomi bertambah tinggi. Perkembangan spesialisasi dan pembagian pekerjaan diantara tenaga kerja akan mempercepat proses pembangunan ekonomi, karena spesialisasi akan meningkatkan produktivitas tenga kerja dan mendorong perkembangan teknologi. Dalam prosesnya, pertumbuhan ekonomi akan semakin terpacu dengan adanya pembagian kerja antar pelaku ekonomi. Adam Smith memandang pekerja sebagai salah satu input bagi proses produksi. Namun hal ini tentu dapat menciptakan kelebihan sumber daya manusia karena pertumbuhan penduduk yang terlalu besar akan menyebabkan tenaga kerja semakin melimpah, dan akan terjadi penurunan upah. Hal ini tentulah dapat menyebabkan perekonomian menjadi stagnan (Ricardo, 1821, dan Brown & Forster, 2013).

Pada dasarnya pertumbuhan ekonomi baik untuk penciptaan lapangan kerja, namun pertumbuhan tersebut penting dilakukan di sektor-sektor yang berpotensi menyerap tenaga kerja dalam skala besar. Khususnya pertumbuhan di bidang manufaktur dan jasa yang memiliki dampak baik pada pertumbuhan lapangan kerja (Warr, 2005). Akan tetapi untuk sektor pertanian yang merupakan sektor basis nyatanya tidak memiliki pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja.

Strategi pembangunan ekonomi adalah untuk meningkatkan output dari sektor pertanian, penciptaan lapangan kerja dan menuntaskan kemiskinan. Namun tingginya angka pengangguran, masalah pertambahan penduduk, distribusi pendapatan yang tidak merata, inflasi yang kurang stabil, dan berbagai masalah lainnya merupakan hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah.

Demi mewujudkan meluasnya lapangan pekerjaan seperti yang dicita-citakan, maka penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi berbagai faktor dapat membuat kondisi pertumbuhan ekonomi dapat menjadi terhambat sehingga mengganggu keseimbangan pasar tenaga kerja untuk dapat memberikan kesempatan kerja secara optimal. Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi, misalnya dengan cara tetap menjaga ritme produksi dan berupaya untuk menjamin keseimbangan dalam keseimbangan pasar tenaga kerja.

Inflasi merupakan indikator makroekonomi yang sangat penting selain pertumbuhan ekonomi. Dalam teori kuantitas, inflasi sama dengan tingkat pertumbuhan jumlah uang yang beredar dikurangi tingkat pertumbuhan output agregat. Pertumbuhan jumlah uang yang beredar tidak lepas dari peran penting masyarakat sebagai pelaku ekonomi, jumlah uang yang beredar diperoleh sebagian besar masyarakat dari upah hasil bekerja atau perolehan kredit dari bank. Masyarakat sebagai pelaku ekonomi tidak lepas dari perhatian pemerintah. Salah satu fungsi pemerintah adalah memberikan jasa layanan pada publik atau masyarakat dalam bentuk jasa kolektif maupun individual. Dalam praktek, pengeluaran pemerintah ini selalu dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik), meskipun tidak seluruh masyarakat

dapat merasakan manfaatnya secara langsung. Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung.

Inflasi menjadi issue yang menarik Ketika laju inflasi mencapai 650 persen pada tahun 1960-an. Tingginya inflasi membuat pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap laju inflasi, sehingga tidak lagi mengalami *double digit*. Menjaga laju inflasi yang rendah dan stabil menjadi salah satu tantangan dalam pengelolaan makroekonomi di sebagian besar negara. Peningkatan inflasi yang terjadi pada perekonomian mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan output dan tenaga kerja, dengan cara memotivasi perusahaan untuk memproduksi lebih atau kurang dari yang telah dilakukannya tergantung intensitasi inflasi yang terjadi.

Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat termasuk penyerapan tenaga kerja. Hal ini penting karena inflasi yang stabil merupakan hal penting bagi investor. Menurut Campbell (2006) bahwa investor adalah agen rasional, sehingga mereka mencoba untuk mengoptimalkan kekayaan dan meminimalkan risiko. Apalagi menurut Blackburn (2014), perilaku investor mungkin bergantung pada berbagai faktor yang mempengaruhi keputusan investasi atau perdagangan. Oleh karena itu, aspek-aspek seperti sektor yang diperdagangkan dan siklus bisnis berdampak pada perilaku investasi, temasuk inflasi yang terkendali.

Menurut model aliran Estep & Hanson (1980), dampak inflasi terhadap harga saham menjadi netral jika perusahaan dapat meneruskan kenaikan harga inflasi kepada konsumen. Jika demikian, maka investasi saham dapat menjadi

tempat yang aman bagi investor karena harga saham naik seiring dengan inflasi. Selain itu, dampak perubahan suku bunga riil dan nominal yang tidak terduga dapat bervariasi menurut sektor tergantung pada karakteristik manfaat dan struktur persaingan sektor tersebut. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Hasil penelitian J. C. Vermeulen (2017) penerapan penargetan inflasi yang terlalu ketat menghambat pertumbuhan lapangan kerja di Afrika Selatan. Hasil berbeda diperoleh oleh Thalassinos (2012) yang menemukan bahwa tingkat inflasi berpengaruh positif terhadap tingkat lapangan kerja. Hasil penellitian Sarel (1996) menunjukkan bahwa ketika tingkat inflasi di atas 8 persen, dampak inflasi terhadap tingkat pertumbuhan adalah signifikan,sangat kuat.

Inflasi pada tahun 2020 adalah 2,8 persen. Hal ini disebabkan oleh permintaan domestik yang lemah, harga komoditas global yang turun, *pass-through* nilai tukar yang terbatas, serta ekspektasi inflasi pelaku ekonomi yang terkendali. Inflasi kelompok *volatile food* (VF) tercatat rendah, didorong permintaan yang lemah dan pasokan yang memadai. Inflasi kelompok *administered prices* (AP) juga melambat dipengaruhi mobilitas dan permintaan yang menurun.

Upah masih tetap menjadi persoalan utama di negara berkembang seperti Indonesia. Di satu sisi pekerja mengharapkan upah yang tinggi namun disisi pengusaha, pemberian upah yang tinggi akan membebani biaya operasional perusahaan. Upah minimum bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi pekerja dari upah yang terlalu rendah. Upah minimum

mendorong terwujudnya keadilan bagi pekerja,pengusaha dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari seperti kebutuhan sandang dan pangan. Antara pekerja/buruh dan pengusaha mempunyai persamaan kepentingan ialah kelangsungan hidup dan kemajuan perusahaan, tetapi di sisi lain hubungan antar keduanya juga memiliki perbedaan dan bahkan potensi konflik, terutama apabila berkaitan dengan persepsi atau interpretasi yang tidak sama tentang kepentingan masing-masing pihak yang pada dasarnya memang ada perbedaan. Pemerintah berfungsi utama mengadakan pengaturan agar hubungan antara pekerja/buruh dengan pengusaha berjalan serasi dan seimbang yang dilandasi oleh pengaturan hak dan kewajiban secara adil serta berfungsi sebagai penegak hukum

Permintaan tenaga kerja merupakan jumlah tenaga kerja yang diminta oleh suatu perusahaan pada tingkat upah tertentu. Pengusaha mempekerjakan seseorang dimaksudkan untuk membantu memproduksi barang atau jasa yang akan dijual kepada masyarakat. Pertambahan permintaan tenaga kerja tergantung dari pertambahan permintaan masyarakat terhadap barang yang di produksinya. Permintaan tenaga kerja yang demikian disebut dengan *derived demand*.

Apabila digunakan asumsi bahwa upah naik,maka akan terjadi yang pertama tingkat upah yang tinggi akan menaikkan biaya produksi perusahaan, selanjutnya akan meningkatkan harga per unit barang yang diproduksinya. Konsumen akan memberikan respon yang cepat apabila terjadi kenaikan barang yaitu dengan mengurangi konsumsi atau bahkan tidak membeli barang yang bersangkutan. Sehingga terjadinya kelebihan barang yang tak terjual dalam pasar dan produsen terpaksa mengurangi jumlah produksinya. Berkurangnya

output yang diproduksi mengakibatkan pengurangan tenaga kerja yang dibutuhkan. Penurunan ini disebut efek skala produksi akibat pengaruh turunnya skala produksi, kedua apabila upah naik(asumsi faktor lain ceteris paribus) maka pengusaha akan lebih menggunakan teknologi padat modal untuk proses produksinya dan menggantikan kebutuhan akan tenaga kerja dengan kebutuhan barang-barang modal seperti mesin dan lain-lain. Penurunan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan karena adanya penggantian atau penambahan pengggunaan mesin-mesin ini disebut denga efek subtitusi.

Secara teoritis, perusahaan hanya akan membayar upah tenaga kerja sesuai dengan produktivitasnya, artinya tenaga kerja yang produktivitasnya rendah akan menerima upah yang rendah dan sebaliknya.

Dyah (2017) berpendapat bahwa upaya pemerintah dalam memaksimalkan tingkat kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan upah masih tetap dinilai kecil untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut kenaikan upah tentunya menjadi harapan bagi para pekerja sehingga pemerintah mengeluarkan peraturan tentang upah dalam UU No. 13 / 2003 tentang ketenagakerjaan. Dimana kenaikan upah akan sejalan dengan terpenuhinya standar kebutuhan hidup layak, kenaikan konsumsi masyarakat juga yang meningkat dan adanya pengakuan atas prestasi, skill serta kemampuan pekerja dalam hal kompetensi dan kapabilitas.

Hasil penelitian Böhm (1978), Sasaki dkk, Du & Wang (2020) , dan Lankisch dkk (2019), menemukan bahwa kenaikan upah dapat dianggap sebagai pemecahan masalah yang sederhana, dampak kenaikan upah dapat berdampak buruk bagi perkembangan iklim usaha dimana salah satunya dampak negatif yang ditimbulkan pasca penetapan kenaikan upah minimum adalah

pemutusan hubungan kerja (PHK) yang secara makro dapat berdampak pada tingginya angka pengangguran, dan lesunya pertumbuhan ekonomi secara makro diantaranya pertumbuhan sektor perekonomian yang kemudian kembali akan berdampak pada konsumsi masyarakat itu sendiri.

Studi terdahulu menjadikan variabel upah sebagai topik yang paling banyak diteliti di kalangan para peneliti yang mengaitkan antara upah dan penyerapan tenaga kerja diantaranya Baek (2016), Dickson (2019), Holtemöller (2020), yang dari aspek sudut pandang teori ekonomi dan teori upah menyatakan adanya kausalitas antara upah dan penyerapan tenaga kerja. Lebih lanjut hasil penelitian Flaschel (2011) menyatakan bahwa penerapan upah minimum dengan batasan tertentu dapat meningkatkan stabilitas perekonomian. Tetapi pendapat berbeda ditunjukkan pada penelitian Baek (2016) upah minimum dan kenaikannya tidak berpengaruh pada tingkat penyerapan tenaga kerja pada sektor perusahaan energi.

Hasil penelitian Cahuc (1996) menunjukkan bahwa upah minimum memiliki efek positif pada pertumbuhan dan efisiensi ekonomi. Berbeda dengan hasil penelitian Cahuc, hasil penelitian Fields (1989) menunjukkan bahwa kenaikan gaji dini harus dihindari, ini akan memungkinkan pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan lapangan kerja. Hasil penelitian Papola (2017) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di India di dukung oleh pemberian upah yang rendah bagi pekerja.

Perbankan adalah media yang menjembatani antara sektor moneter dengan sektor riil. Perbankan merupakan intermediator dalam menampung dana yang berlebih dari masyarakat dan menyalurkanya kembali kepada pihak yang membutuhkan dana dalam bentuk kredit. Peran perbankan dalam hal ini sangat

dibutuhkan untuk membantu pengalokasian agar alokasi dana dapat efisien. Selain itu, perbankan juga memiliki kemampuan untuk mengetahui masalah informasi asimetris yang terjadi di pasar kredit. Sebagai penghubung antara investor dan pengusaha, perbankan mampu memberikan informasi yang seimbang antara kedua belah pihak. Hal ini dapat dilihat dari fungsi bank sebagai perantara (intermediary), sehingga kepercayaan masyarakat luas sebagai nasabah kian bertambah.

Peranan bank sebagai lembaga keuangan tidak lepas dari masalah kredit bahkan kegiatan bank sebagai lembaga keuangan, pemberian kredit merupakan kegiatan utamanya. Besarnya jumlah kredit yang disalurkan akan menetukan keuntungan bank. Jika bank tidak mampu menyalurkan kredit, sementara dana yang terhimpun dari simpanan banyak maka menyebabkan bank tersebut rugi. Oleh karena itu pengelolaan kredit harus dilakukan sebaik – baiknya mulai dari perencanaan jumlah kredit, penentuan suku bunga, prosedur pemberian kredit, analisis pemberian kredit sampai proses pengendalian kredit macet.

Pengertian kredit menurut Undang – undang Perbankan nomor 10 tahun 1998 adalah penyedian uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan nilainya dapat diukur dengan uang, misalnya bank membiaya kredit untuk pembelian rumah atau mobil. Kemudian adanya kesepakatan antara bank (kreditur) dengan nasabah penerima kredit (debitur), dengan perjanjian yang telah dibuatnya. Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing – masing pihak, termasuk jangka waktu dan bunga yang ditetapkan bersama. Fungsi-fungsi kredit dalam garis besar besarnya adalah

kredit dapat meningkatkan daya guna (utility) dari uang, Kredit dapat meningkatkan daya guna (utility) dari barang, Kredit meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, Kredit adalah salah satu alat stabilisasi ekonomi, Kredit menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat, Kredit adalah jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional dan Kredit adalah juga sebagai alat hubungan ekonomi internasional.

Permasalahan yang pelik pada persoalan kredit perbankan di Indonesia adalah macetnya suatu kredit diidentifikasi pada prosedur pengindentifikasian debitur berdasarkan asas kepantasan, selain dari pada itu persoalan ketidak-stabilan ekonomi global juga menjadi pemicu yanqg turut memengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hasil penelitian Chodorow-Reich (2014) yang menunjukkan bahwa perusahaan kecil yang meminjam dari bank yang kemudian mengalami penurunan nilai, mengurangi lapangan kerja lebih banyak daripada perusahaan kecil yang tidak memiliki banyak pinjaman di bank. Berdasarkan teori Schumpeter (2017) bahwa kesulitan besar yang harus dipahami oleh para ekonom bahwa pinjaman bank memang menciptakan simpanan dan memiliki peran sentral untuk dimainkan dalam pembiayaan investasi, terlepas dari tabungan sebelumnya, dan mengakui pencapaian Wicksell "untuk mengenali aspek-aspek tertentu dari 'penciptaan kredit'.

Berdasarkan teori dari Hanh (1920) kegiatan bank terdiri dari berfungsi sebagai penjamin, yaitu untuk mendapatkan kepercayaan bagi debitur. Oleh karena itu, pasar uang dan kredit tidak lain adalah pasar di mana kredit dalam arti kepercayaan yang sebenarnya diperdagangkan. Hahn menyangkal gagasan tradisional tentang peran bank yang hanya berfungsi sebagai mediator kredit antara penabung dan investor. Berbeda dengan Macleod, yang dalam tulisannya

penciptaan uang oleh bank swasta berpihak pada bank sentral, di Hahn kapasitas penciptaan uang dari sektor perbankan swasta mengambil peran kunci. “Adalah pandangan dasar dari pekerjaan ini bahwa bisnis pasif bank bukanlah pengandaian tetapi hanya hasil dari penciptaan kredit”.

Hasil penelitian Stieglitz (2020) menunjukkan bahwa pengusaha tanpa akses kredit yang memadai tidak dapat memperoleh manfaat penuh penyerapan tenaga kerja secara terbuka. Senada dengan hasil penelitan Stieglitz, penelitian Popov & Rocholl (2018) juga menunjukkan hal yang sama yakni perusahaan yang memiliki kredit dengan banyak bank, cenderung memiliki basis lapangan kerja yang lebih besar sehingga penyerapan tenaga kerjapun cenderung lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang memiliki kredit dengan jumlah bank yang sedikit. Lebih lanjut hasil penelitian Laeven (2018) menunjukkan bahwa ada hubungan antara kredit bank terhadap penyerapan tenaga kerja dalam menentukan pertumbuhan perusahaan. Sedangkan adanya hasil yang berbeda yang menjadi gap didalam penelitian ini mengenai keterkaitan antara kredit bank dan pertumbuhan ekonomi, pada penelitian dari Mandel (2016), dan Restrepo (2019), keduanya menyatakan bahwa faktor kredit bank yang dijembatani oleh kebijakan ekonomi dan pajak tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Lebih lanjut hasil penelitian Mian (2014) menemukan bahwa tidak ada korelasi signifikan antara pengajuan kredit dengan hilangnya lapangan kerja.

Hasil penelitian Akpansung (2011) menemukan bahwa kredit sektor swasta berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi selama periode 1970-2008. Hasil penelitian Oluitan (2012) juga menunjukkan hal yang sama yakni kredit bank terkait erat dengan pertumbuhan ekonomi untuk perdagangan internasional dan aliran modal di non-minyak. Sedangkan hasil penelitian

Timsina (2014) menunjukkan bahwa kredit bank berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi jangka pedek.

Upaya pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan investasi dapat ditempuh dengan cara pengefektifan belanja negara *(government expenditure).* Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan (2018), data pada APBN 2018, total belanja negara menghabiskan anggaran sebesar 2.220,7 tiriliun rupiah, dimana kategori belanja negara terbesar dianggarkan untuk belanja kementerian dan lembagaan (K/L) sebesar 847,4 tiriliun rupiah, transfer kedaerah dan dana desa sebesar 766,2 triliun dan belanja non-K/L sebesar 607,1 tiriliun rupiah (www.kemenkeu.go.id, 2018). Tujuan daripada belanja negara tersebut adalah untuk mensinergikan program perlindungan sosial dan mempertajam bantuan sosial, salah satunya pada aspek Pendidikan dan kesehatan.

Penelitian Barro (1981) menguji pengeluaran pemerintah yang bersifat permanen dan sementara terhadap penyerapan tenaga kerja, hasilnya diperoleh bahwa perubahan permanen dalam pengeluaran pemerintah memiliki dampak yang lebih besar pada lapangan kerja daripada pengeluaran pemerintah yang bersifat sementara dengan ukuran yang sama.

Hasil senada juga ditemukan oleh Karras (1993) bahwa pengeluaran pemerintah yang berkaitan dengan sektor publik memiliki dampak yang lebih besar pada output dan kesempatan kerja. Namun temuan berbeda diperoleh Yuan (2000) yang menemukan bahwa lonjakan pengeluaran mampu mengurangi jumlah penyerapan tenaga kerja, namun lonjakan pengeluaran pemerintah jika terjadi terus menerus akan mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

Hasil penelitian Ram (1986) menemukan pengaruh positif dan signifikan dari pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi, menggunakan data dari 115 negara selama periode 1960-1980. Tetapi penelitian Engen & Skinner (1992) bertentangan dengan penelitian Ram, dengan menggunakan data dari 107 negara selama periode 1970-1985 peningkatan anggaran berimbang dalam pengeluaran pemerintah dan perpajakan diperkirakan akan menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi Negara. Penelitian berbeda juga ditemukan oleh Lin (1994) pengeluaran pemerintah diperkirakan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek tetapi tidak dalam jangka menengah.

Permasalahan ketenagakerjaan yang semakin mengkawatirkan akibat ketersediaan lapangan pekerjaan yang tidak sejalan dengan pertumbuhan penduduk yang tentunya dapat menyebabkan berkurangnya penyerapan tenaga kerja. Hal ini menarik untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruh penyerapan tenaga kerja.

B. Rumusan Masalah

Berdasar penjabaran latar belakang tersebut di atas, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah tingkat inflasi berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja baik secara langsung maupun tidak langsung melalui produk domestik bruto?
2. Apakah upah berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja baik secara langsung maupun tidak langsung melalui produk domestik bruto?

3. Apakah kredit perbankan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja baik secara langsung maupun tidak langsung melalui produk domestik bruto?
4. Apakah pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja baik secara langsung maupun tidak langsung melalui produk domestik bruto?
5. Apakah produk domestik bruto berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada permasalahan diatas, tujuan utama penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tingkat inflasi terhadap penyerapan tenaga kerja baik secara langsung maupun tidak langsung melalui produk domestik bruto
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh upah terhadap penyerapan tenaga kerja baik secara langsung maupun tidak langsung melalui produk domestik bruto
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kredit perbankan terhadap penyerapan tenaga kerja baik secara langsung maupun tidak langsung melalui produk domestik bruto
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja baik secara langsung maupun tidak langsung melalui produk domestik bruto

5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh produk domestik bruto terhadap penyerapan tenaga kerja.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah diuraikan maka hasil dari penelitian ini diupayakan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Memberikan manfaat dan implikasi baik secara teoretis keilmuan bidang ilmu yakni pemahaman secara makro dan mikro keterkaitan antara upah, kredit bank, pengeluaran pemerintah, dan tingkat inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja

2. Kegunaan Praktis

a. Penelitian ini diupayakan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah mengenai pentingnya mengatur regulasi yang efektif, efisien dan pro pembangunan demi mewujudkan pertumbuhan ekonomi, dan penyerapan tenaga kerja melalui efektivitas dari peran upah, kredit bank, tingkat inflasi dan pengeluaran pemerintah.
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan tentang penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah, upah, kredit bank dan inflasi
c. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi ataupun menjadi gap penelitian bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang memiliki permasalahan penelitian yang relevan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori dan Konsep

1. Pandangan Teoretis tentang Penyerapan Tenaga Kerja

Penyerapan tenaga kerja adalah jumlah tertentu dari tenaga yang digunakan dalam suatu unit usaha tertentu atau dengan kata lain penyerapan tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja ini dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internal dipengaruhi oleh tingkat upah, produktivitas tenaga kerja,modal,dan pengeluaran non upah,sedangkan faktor eksternal anatara lain tingkat pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran ,dan tingkat suku bunga**.** Penyerapan tenaga kerja telah menarik perhatian-perhatian ahli ekonomi dunia karena pengaruhnya.

Adam Smith merupakan tokoh utama dari aliran ekonomi yang kemudian dikenal sebagai aliran klasik. Dalam hal ini teori klasik Adam Smith (1776) juga melihat bahwa alokasi sumber daya manusia yang efektif adalah pemula pertumbuhan ekonomi. Setelah ekonomi tumbuh,akumulasi modal baru mulai dibutuhkan untuk menjaga agar ekonomi tumbuh, dengan kata lain, alokasi sumber daya manusia yang efektif merupakan syarat perlu bagi pertumbuhan ekonomi

Teori klasik mengandalkan bahwa kesiapan pengusaha untuk memulai proses produktif tergantung pada jumlah nilai dalam hal produk yang diharapkan. Penggunaan faktor-faktor produksi untuk meningkatkan output melibatkan pengusaha dalam pengeluaran bukan produk, tetapi uang. Tetapi dalam ekonomi wirausaha, fluktuasi permintaan efektif menjadi faktor yang

mendominasi dalam menentukan penyerapan tenaga kerja. Ketika pekerjaan meningkat, pendapatan rill agregat meningkat. Sehingga ketika pendapatan rill agregat meningkat, tetapi tidak sebanyak pendapatan, pengusaha akan merugi jika seluruh peningkatan lapangan kerja dicurahkan untuk memenuhi peningkatan permintaan akan konsumsi.

Tulisan Wilkinson (2000), menjelaskan bahwa dalam tradisi neoklasik, tingkat harga umum adalah fungsi dari penawaran uang, dan tingkat pekerjaan ditentukan di pasar tenaga kerja dan diwujudkan di pasar produk karena penawaran menciptakan permintaannya sendiri (Hukum Say). Argumennya adalah bahwa kebebasan pekerja untuk menjual dan kapitalis untuk membeli tenaga kerja di pasar memastikan bahwa upah nominal sama dengan nilai produk marjinal tenaga kerja, di luar titik itu tidak lagi menguntungkan bagi perusahaan untuk mempekerjakan lebih banyak pekerja. Hal yang mendasari hubungan ini adalah: kurva permintaan tenaga kerja yang miring ke bawah sehingga, jika pekerjaan ingin meningkat, upah harus turun. Hal ini didasarkan pada gagasan bahwa produktivitas tenaga kerja menurun karena tenaga kerja yang dipekerjakan meningkat relatif terhadap modal dan/atau faktor produksi lainnya.

Ditinjau dari sisi penawaran, penerimaan suatu pekerjaan akan bergantung pada upah yang ditawarkan untuk mengkompensasi disutilitas marginal pekerjaan. Beban kerja diasumsikan meningkat karena semakin banyak yang dilakukan, disutilitas marjinal meningkat dan dengan itu upah yang diperlukan untuk kompensasinya. Oleh karena itu, kurva penawaran tenaga kerja miring ke atas.

Perpotongan kurva permintaan agregat dan penawaran tenaga kerja menentukan upah yang mampu dibayar oleh perusahaan. Pengangguran kemudian dianggap sebagai bukti kurangnya keterampilan yang sesuai dari pihak pengangguran, keengganan untuk bekerja dengan upah yang berlaku, ketidaksempurnaan di pasar tenaga kerja yang mencegah upah jatuh ke tingkat ekuilibrium, atau kombinasi dari semuanya. Kemungkinan pengangguran paksa, dalam arti bahwa para pekerja tidak memiliki pekerjaan karena tidak ada pekerjaan untuk mereka lakukan bahkan jika mereka bersedia dan dapat menerima upah yang lebih rendah, disangkal oleh para ahli teori neoklasik.

Teori produktivitas marjinal adalah kelemahan dari teori ketenagakerjaan neoklasik. Keuntungan Teoretis dari tingkat substitusi marjinal yang semakin berkurang dari satu faktor ke faktor lain sudah jelas. Ini memberikan keseimbangan yang stabil dan menghilangkan masalah pelik distribusi pendapatan antara penuntut yang bersaing dengan menghubungkannya dengan produktivitas mereka.

John Maynard Keynes (1937b) berpendapat bahwa dalam kenyataan pasar tenaga kerja tidak sesuai dengan pandangan klasik. Dimanapun para pekerja mempunyai semacam serikat kerja yang akan berusaha memperjuangkan kepentingan buruh dari penurunan tingkat upah. Kalaupun tingkat upah diturunkan tetapi kemungkinan ini dinilai Keynes kecil sekali, tingkat pendapatan masyarakat tentu akan turun. Turunnya pendapatan sebagai anggota masyarakat akan menyebabkan turunnya daya beli masyarakat yang pada gilirannya akan menyebabkan konsumsi secara keseluruhan berkurang, berkurangnya daya beli masyarakat akan mendorong turunnya harga-harga.

Serangan utama Keynes terhadap teori ketenagakerjaan neoklasik datang dalam sanggahannya terhadap Hukum Say. Keynes berpendapat bahwa, ketika pendapatan meningkat, individu menyimpan proporsi yang meningkat. Karena tidak ada mekanisme di mana pendapatan yang dihemat secara otomatis diambil dan diinvestasikan, kecenderungan yang meningkat untuk menabung secara progresif menurunkan permintaan konsumsi dan kesempatan kerja sampai pengurangan pendapatan agregat menekan tabungan berlebih. Jadi, tabungan disejajarkan dengan investasi bukan dengan bekerjanya pasar modal tetapi oleh perubahan tingkat pendapatan dan kesempatan kerja. Hasilnya adalah pengangguran yang tidak disengaja ketidakmampuan pekerja untuk mendapatkan pekerjaan pada, atau bahkan di bawah, upah yang berlaku karena kurangnya permintaan akan produk atau jasa yang dapat mereka hasilkan.

Dalam kritiknya terhadap teori pekerjaa neoklasik, Keynes mempertahankan teori produktivitas marjinal dari permintaan tenaga kerja tetapi menolak penjelasan disutilitas marjinal untuk penawaran tenaga kerja. Penolakan ini dilakukan dengan dua alasan. Yang pertama terkait dengan perilaku kerja yang sebenarnya. Penurunan upah riil karena kenaikan harga, dengan upah uang tidak berubah, sebagai suatu peraturan, tidak menyebabkan penawaran tenaga kerja yang tersedia yang ditawarkan dengan upah saat ini turun di bawah jumlah yang sebenarnya digunakan sebelum kenaikan harga. Keberatan kedua, yang dianggapnya lebih mendasar, adalah asumsi bahwa tawar-menawar antara pekerja dan atasan mereka menentukan tingkat upah riil.

Teori ekonomi makro menyoroti fakta bahwa upah yang lebih tinggi tidak hanya meningkatkan biaya tenaga kerja bagi pengusaha, tetapi juga meningkatkan permintaan konsumsi di antara pekerja berupah rendah dan

keluarga mereka. Dengan asumsi tidak ada efek negatif yang besar pada daya saing eksternal (yang mungkin terjadi pada ekonomi yang sangat berorientasi ekspor) atau investasi, “efek konsumsi” positif tersebut dapat menyebabkan peningkatan permintaan agregat dan lapangan kerja. Perspektif makro-ekonomi menunjukkan bahwa bahkan jika beberapa perusahaan dengan produktivitas rendah mengurangi pekerjaan atau keluar dari bisnis, ini tidak berarti bahwa lapangan kerja agregat akan berkurang. Pekerjaan dapat berkembang di perusahaan lain dan upah yang lebih tinggi dapat menarik lebih banyak orang ke pasar tenaga kerja.

2. Pandangan Teoretis tentang Produk domestik bruto

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang amat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat.

Dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga akan meningkat. Dengan perkataan lain bahwa pertumbuhan ekonomi lebih menunjuk kepada perubahan yang bersifat kuantitatif *(quantitative change)* dan biasanya diukur dengan menggunakan data Produk Domestik Bruto (PDB) atau pendapatan atau nilai akhir pasar *(total market value)* dari barang-barang akhir dan jasa-jasa (*final*

goods and services) yang dihasilkan dari suatu perekonomian selama kurun waktu tertentu (biasanya satu tahun).

Pertumbuhan ekonomi berbeda dengan pembangunan ekonomi, kedua istilah ini mempunyai arti yang sedikit berbeda. Kedua-duanya memang menerangkan mengenai perkembangan ekonomi yang berlaku. Tetapi biasanya, istilah ini digunakan dalam konteks yang berbeda. Pertumbuhan selalu digunakan sebagai suatu ungkapan umum yang menggambarkan tingkat perkembangan sesuatu negara, yang diukur melalui persentasi pertambahan pendapatan nasional riil. Istilah pembangunan ekonomI biasanya dikaitkan dengan perkembangan ekonomi di negara-negara berkembang. Dengan perkataan lain, dalam mengartikan istilah pembangunan ekonomi, ahli ekonomi bukan saja tertarik kepada masalah perkembangan pendapatan nasional riil, tetapi juga kepada modernisasi kegiatan ekonomi,misalnya kepada usaha merombak sektor pertanian yang tradisional, masalah mempercepat pertumbuhan ekonomi dan masalah perataan pembagian pendapatan (Sukirno, 2003)

Perkembangan teori pertumbuhan ekonomi sebenarnya telah dimulai oleh Smith (1776) yang dibangun diatas landasan filsafat kapitalisme. Jika digali secara teoritik maka pandangannya dapat dibedakan dalam beberapa pokok pikiran utama. Pertama *laissez faire laissez passer* yaitu kebebasan dalam bidang ekonomi yang memberikan isyarat perlunya atau memberi peranan yang minimum kepada pemerintah. *Kedua,* mekanisme pasar yaitu keyakinan akan munculnya kekuatan penawaran dan permintaan. Karena akan dituntun oleh the *invisible hands. Ketiga full employment* yaitu kepercayaan akan terjadinya tingkat pekerjaan penuh,artinya tidak ada pengangguran,kalaupun ada maka sifatnya

hanya semntara. *Keempat harmony of interest* yaitu kepercayaan akan adanya pemenuhan kepentingan masyarakat jika ada pemenuhan kepentingan individu, *Kelima* kepercayaan akan *supply creates its own demand* yaitu keadaan dimana tidak adanya over produksi karena terserap di pasar.

Teori pertumbuhan neo-klasik dikembangkan oleh Robert M. Solow-Swan (1970). Model Solow-Swan menggunakan unsur pertumbuhan penduduk, akumulasi, kapital, kemajuan teknologi, dan besarnya output yang saling berinteraksi. Perbedaan utama dengan model Harrod-Domar adalah dimasukkannya unsur kemajuan teknologi dalam modelnya. Selain itu, Solow-Swan menggunakan model fungsi produksi yang memungkinkan adanya substitusi antara capital/kapital (C) dan tenaga kerja/labor (L). Dengan demikian, syarat-syarat adanya pertumbuhan ekonomi yang baik dalam model Solow-Swan kurang restriktif disebabkan kemungkinan substitusi antara tenaga kerja dan modal.

Tingkat pertumbuhan berasal dari tiga sumber yaitu, akumulasi modal, bertambahnya penawaran tenaga kerja, dan peningkatan teknologi. Teknologi ini terlihat dari peningkatan skill atau kemajuan teknik, sehingga produktivitas capital meningkat. Dalam model tersebut, masalah teknologi dianggap sebagai fungsi dari waktu. Teori neo-klasik sebagai penerus dari teori klasik menganjurkan agar kondisi selalu diarahkan untuk menuju pasar sempurna. Dalam keadaan pasar sempurna, perekonomian bias tumbuh maksimal.

Sama seperti dalam ekonomi model klasik, kebijakan yang perlu ditempuh adalah meniadakan hambatan dalam perdagangan, termasuk peindahan orang, barang, dan modal. Harus dijamin kelancaran arus barang, modal, dan tenaga kerja, dan perlunya penyebarluasan informasi pasar. Harus

diusahakan terciptanya prasarana perhubungan yang baik dan terjaminnya keamanan, ketertiban, dan stabilitas politik. Analisis lanjutan dari paham neoklasik menunjukkan bahwa untuk terciptanya suatu pertumbuhan yang mantap *(steady growth),* diperlukan suatu tingkat *saving* yang tinggi dan seluruh keuntungan pengusaha diinvestasikan kembali.

Sekelompok model yang muncul selama tahun 1980-an menjelaskan pertumbuhan ekonomi jangka panjang secara endogen, dengan melonggarkan asumsi pengembalian modal yang semakin berkurang dan dengan memberikan kemajuan teknologi secara endogen ke model tersebut.

Pertumbuhan output dan produktivitas tidak bergantung pada kemajuan teknis eksogen. Romer (1994), mendalilkan bahwa kegiatan R&D dikaitkan dengan eksternalitas yang mempengaruhi stok pengetahuan yang tersedia untuk semua perusahaan. Fungsi produksi perusahaan ditentukan oleh variabel spesifik perusahaan (jasa modal, tenaga kerja dan input R&D) dan istilah shift (indeks teknologi) yang merupakan fungsi dari stok pengetahuan yang tersedia untuk semua perusahaan; ini mencerminkan karakteristik publik yang baik dari kegiatan yang menghasilkan pengetahuan seperti R&D. Jelas bahwa teori pertumbuhan endogen memiliki potensi untuk memperhitungkan berbagai faktor yang memungkinkan inovasi.

Research and Development (R&D), atau model pertumbuhan endogen berbasis ide mengidentifikasi dan secara eksplisit memodelkan inovasi (khususnya, akumulasi dan difusi pengetahuan teknologi) sebagai kekuatan pendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dalam model ini, "ide" (dalam bentuk cetak biru untuk produk baru atau proses baru) dihasilkan oleh investasi dalam R&D. Dengan demikian, model ini memperlakukan R&D sebagai aktivitas

kewirausahaan yang dilakukan oleh perusahaan yang memaksimalkan keuntungan.

Ide yang dihasilkan oleh R&D mengarah pada proses dan produk baru yang digunakan sebagai input dalam produksi barang jadi. Inovasi berbasis R&D merupakan penentu penting dari daya saing perusahaan, hal ini tidak secara eksklusif mempengaruhi kinerja, namun menimbulkan efek eksternal yang penting *("R&D spillovers").* Elemen penting dari efek eksternal ini adalah "limpahan pengetahuan", yang terjadi jika pengetahuan baru yang dihasilkan oleh kegiatan R&D dari satu agen akan merangsang pengembangan pengetahuan baru oleh orang lain, atau meningkatkan kemampuan teknologi mereka.

Pendekatan evolusioner terhadap pertumbuhan menarik perhatian pada tiga aspek yang diabaikan baik dalam model pertumbuhan neo-klasik maupun endogen. Pertama, kemajuan teknologi harus dikonseptualisasikan sebagai proses ketidakseimbangan yang melibatkan ketidak pastian ex-ante yang tinggi (keinginan akan barang dan jasa yang tidak didukung oleh kemampuan untuk membayar barang dan jasa tersebut), ketergantungan jalur dan proses penyesuaian yang tahan lama. Kedua, teori pertumbuhan harus didasarkan pada teori perusahaan yang lebih realistis yang menekankan kemampuan (strategis) perusahaan dalam arti luas, bukan hanya investasi dalam modal manusia dan R&D. Ketiga, harus mempertimbangkan kerangka kelembagaan yang mungkin memberikan kontribusi kuat untuk penjelasan perbedaan lintas negara dalam pertumbuhan ekonomi.

Teori Schumpeter (1972) menekankan pada inovasi yang dilakukan oleh para pengusaha dan mengatakan bahwa kemajuan teknologi sangat ditentukan

oleh jiwa usaha *(entereneurship)* dalam masyarakat yang mampu melihat peluang dan berani mengambil risiko membuka usaha baru, maupun memperluas usaha yang telah ada., maka para pengusaha akan meminjam modal dan mengadakan investasi. Investasi ini akan mempertinggi kegiatan ekonomi suatu negara. Kenaikan tersebut selanjutnya juga akan mendorong pengusaha-pengusaha lain untuk menghasilkan lebih banyak lagi sehingga produksi agregat akan bertambah.

Schumpeter (1972) menyatakan bahwa jika tingkat kemajuan suatu perekonomian semakin tinggi maka keinginan untuk melakukan inovasi semakin berkurang, hal ini disebabkan oleh karena masyarakat telah merasa mencukupi kebutuhannya. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi akan semakin lambat jalannya dan pada akhirnya tercapai tingkat keadaan tidak berkembang *(stationary state).* Namun keadaan tidak berkembang yang dimaksud di sini berbeda dengan pandangan klasik. Dalam pandangan Schumpeter keadaan tidak berkembang itu dicapai pada tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi. Sedangkan dalam pandangan klasik, keadaan tidak berkembang terjadi pada waktu perekonomian berada pada kondisi tingkat pendapatan masyarakat sangat rendah.

3. Pandangan Teoretis tentang Inflasi

Inflasi dapat diartikan sebagai gejala kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus menerus. Secara umum pendapat ahli ekonomi menyimpulkan bahwa inflasi yang menyebabkan turunnya daya beli dari nilai uang terhadap barang-barang dan jasa, besar kecilnya ditentukan oleh elastisitas permintaan dan penawaran akan barang dan jasa. Faktor lain yang juga turut menentukan fluktuasi tingkat harga umum diantaranya adalah kebijakan

pemerintah mengenai tingkat harga, yaitu dengan mengadakan kontrol harga, pemberian subsidi kepada konsumen dan lain sebagainya.

Satu-satunya hambatan terpenting untuk pekerjaan penuh adalah keyakinan yang dipegang oleh para ekonom ortodoks, pembuat kebijakan, bankir sentral, dan komunitas keuangan internasional bahwa pengangguran diperlukan untuk mengendalikan inflasi.

Dalam tradisi neoklasik, tingkat harga umum adalah fungsi dari penawaran uang, dan tingkat pekerjaan ditentukan di pasar tenaga kerja dan diwujudkan di pasar produk karena penawaran menciptakan permintaannya sendiri (Hukum Say).

Dalam teori umum, inflasi permintaan, bersandar pada keyakinan bahwa tekanan inflasi berasal dari kelebihan permintaan moneter atas penawaran pada, atau mendekati, kesempatan kerja penuh. Awalnya, fokusnya adalah pada tekanan permintaan di pasar produk. Namun, Phillips (Philips, 1958) mengalihkan penekanan pada permintaan berlebih di pasar tenaga kerja berdasarkan hubungan terbalik yang dapat diamati secara historis antara pengangguran dan inflasi upah. Philips menjelaskan hal ini dengan limpahan kelebihan permintaan pasar produk ke pasar tenaga kerja di mana Philips menarik upah karena pengusaha bersaing untuk mendapatkan tenaga kerja yang semakin langka. Pentingnya analisis kurva Phillips dalam perumusan ulang teori dan kebijakan adalah bahwa, terlepas dari orientasi Keynesian-nya, analisis ini berfungsi untuk melegitimasi apa yang sebelumnya dianggap sebagai tingkat pengangguran yang tidak dapat diterima dan mengalihkan perhatian pada apa yang semakin dianggap sebagai tingkat pengangguran yang sangat tinggi. Namun demikian, di mana pun tekanan inflasi permintaan dirasakan, kunci

pengendaliannya bagi para ahli teori inflasi permintaan Keynesian adalah tingkat permintaan efektif.

Di dalam teori umum, Keynes (1937b) berpendapat, bahwa: efek kombinasi di pihak sekelompok pekerja adalah untuk melindungi relatif upah riil. Upah riil tergantung pada kekuatan lain dari sistem ekonomi. Pandangan ini membawa implikasi bahwa gangguan upah relatif akan memicu klaim saingan untuk memulihkan perbedaan yang menyamaratakan inflasi upah. Harga kemudian akan naik ke tingkat yang ditentukan oleh kelebihan kenaikan upah di atas tingkat rata-rata pertumbuhan produktivitas. Dari sini dapat disimpulkan bahwa inflasi memerlukan intervensi langsung dalam proses penentuan upah melalui kebijakan pendapatan.

Menurut Milton Friedman (1976), inflasi adalah fenomena moneter murni yang disebabkan oleh peningkatan jumlah uang beredar. Tingkat pengangguran, lanjutnya, ditentukan oleh penawaran dan permintaan di pasar tenaga kerja, dan tingkat pengangguran ada di mana inflasi stabil: tingkat alami ditentukan oleh ketidakfleksibelan dan ketidaksempurnaan pasar tenaga kerja. Peningkatan jumlah uang beredar dapat menyebabkan lapangan kerja meningkat melampaui tingkat alami, tetapi hanya sementara sementara ekspektasi inflasi yang dinyatakan dalam klaim upah disesuaikan ke atas ke tingkat kenaikan harga yang lebih tinggi.

Dalam Kurva Phillips (*Phillips Curve*), semakin tinggi laju peningkatan upah, maka semakin rendah tingkat pengangguran. Sebaliknya, semakin tinggi tingkat pengangguran, semakin rendah laju peningkatan upah. Jadi, meskipun tidak secara eksplisit menghubungkan tingkat pengangguran dan tingkat inflasi, melainkan laju peningkatan upah dan tingkat pengangguran, Kurva Phillips

dianggap cenderung memperkuat teori ekonomi yang sudah ada mengenai hubungan yang negatif antara tingkat pengangguran dan tingkat inflasi.

Sifat umum dari Kurva Phillips adalah pada mulanya penurunannya adalah sangat curam, tetapi semakin lama semakin landai: bila tingkat pengangguran sangat rendah, tingkat upah semakin cepat kenaikannya. Atau semakin rendah pengangguran, maka semakin tinggi tignkat inflasi; bila tingkat pengangguran relatif tinggi, kenaikan upah relatif lambat terjadi. Atau semakin tinggi pengangguran, maka semakin rendah inflasi.

Teori Kurva Phillips menunjukkan bahwa perubahan inflasi dipengaruhi oleh kondisi perekonomian relatif terhadap kapasitas produktifnya, juga faktor-faktor lain. Para ahli ekonomi sudah berdebat mengenai sebab-musabab naik-turunnya (*fluktuation*) inflasi (*prices up*. Akan tetapi, ada dua kubu teori. Yang satu sebut saja *pull theory*. Yang lain sebut jugalah *push theory* (Ormerod, 1999). *Pull theory* mengatakan, inflasi meningkat karena ditarik oleh permintaan yang semakin tinggi (*high level of demand)*. *Push theory*, inflasi meningkat karena terdorong oleh tekanan penawaran yang merosot (*low level of supply*).

4. Pandangan Teoretis tentang Upah Minimum

Upah dapat diartikan sebagai hak yang diterima oleh pekerja berupa imbalan dalam bentuk uang atas pekerjaan yang telah dilakukan seseorang terhadap perusahaan berdasarkan kesepakatan, perjanjian kerja dan peraturan. Upah diartikan sebagai suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberian kerja seseorang kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah maupun yang akan dilakukan. Berfungsi sebagai jaminan kelangsungan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan dinyatakan serta dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, undang-undang dan

peraturan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja.

Upah juga dapat diartikan sebagai imbalan jasa yang diterima seseorang didalam hubungan kerja yang berupauang dan barang, melalui perjanjian kerja, imbalan jasa diperuntukan untuk memenuhi kebutuhan bagi diri dan keluarganya. Dalam pengertian teori ekonomi, upah yaitu pembayaran yang di peroleh berbagai bentuk jasa yang disediakan dan diberikan oleh tenagakerja kepada pengusaha.

Upah adalah cerminan pendapatan dalam bentuk upah uang yang diterima oleh buruh sesuai dengan jumlah dan kualitas yang dicurahkan untuk pembuatan suatu produk. Upah dapat diartikan sebagai pengganti atas jasa yang telah diberikan oleh tenaga kerja kepada sebuah perusahaan. Oleh karena itu dalam pemberian upah, perusahaan perlu memperhatikan prinsip adil dan layak. Adil adalah bahwa besarnya upah harus dikaitkan dengan nilai relatif pekerjaan. Dengan kata lain pekerjaan-pekerjaan sejenis memperoleh bayaran yang sama. Sedangkan yang dimaksud layak adalah bahwa besarnya upah yang diberikan pada karyawan harus sama dengan pembayaran yang di terima karyawan yang serupa di perusahaan lain.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait upahyaitu: ada dua pihak yang mempunyai dan berkewajiban yang berbeda tetapi saling mempengaruhi dan saling menentukan yang satu dengan yang lainnya; pihak pekerja yang memikul kewajiban dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan dan perintah yang diberikan oleh pengusaha/organisasi serta berhak untuk mendapatkan upah atau kompensasi; pihak pengusaha/organisasi memikul kewajiban untuk memberikan upah atau ganjaran atas pelaksanaan

pekerjaan oleh pekerja; selanjutnya hak dan kewajiban ini timbul pada saat adanya hubungan kerja.

Sistem pengupahan di suatu negara didasarkan pada filsafah atau system perekonomian negara tersebut. Teori yang mendasari system pengupahan pada dasarnya dapat di bedakan menurut dua yaitu, (1) Menurut Karl Marx mengenai teori nilai dan pertentangan kelas, (2) Berdasarkan pada teori pertambahan produk marginal berlandaskan asumsi perekonomian bebas. Sistem pengupahan dari ekstrim pertama pada umumnya dilaksanakan dinegara penganut paham komunis, sedangkan system pengupahan ekstrim kedua pada umumnya dipergunakan di negara–negara kapitalis.

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan upah tenaga kerja yakni jam kerja, lama kerja, dan tingkat pendidikan. Jam kerja merupakan waktu yang dilakukan sesesorang untuk melakukan pekerjaan, yang dapat dilaksanakan pada siang hari maupun pada malam hari sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Namun apabila jam kerja melebihi ketentuan waktu kerja maka waktu kerja tersebut bisa di anggap masuk sebagai waktu lembur sehingga tenaga kerja atau buruh berhak atas upah lembur.

Variabel yang tidak dapat dipisahkan dalam tinjauan operasional adalah tingkat upah dan curahan jam kerja. Seseorang mendapatkan upah dari suatu pekerjaan melalui pencurahan waktu untuk bekerja menghasilkan barang dan jasa. Intensitas tenaga kerja yang dicurahkan seseorang untuk suatu pekerjaan dipengaruhi oleh tingkat upah yang diperoleh. Semakin tinggi upah (mencapai pada titik tertentu) maka semakin besar pula lama kerja yang dicurahkan oleh seseorang . Sebaiknya semakin banyak waktu yang dicurahkan seseorang maka semakin besar pula output yang dihasilkan.

Hafid & Mudakir (2014), menyatakan bahwa jam kerja adalah jangka waktu yang dinyatakan dalam jam yang digunakan untuk bekerja atau melakukan kegiatan perusahaan (tidak temasuk istirahat resmi), yang dimulai dari menyiapkan pekerjaan sampai dengan usaha ditutup. Hubungan jam kerja dengan upah dapat dilihat bahwa jika ada kenaikan upah berarti terjadi pertambahan pendapatan yang diperoleh pekerja serta diiringi dengan penambahan jam kerjanya. Dengan status ekonomi yang lebi tinggi maka seseorang cenderung untuk meningkatkan konsumsi dan menikmati waktu senggang lebih banyak, yang berarti mengurangi jam kerja. Namun disisi lain kenaikan tingkat upah juga berarti harga waktu menjadi lebih mahal. Nilai waktu yang lebih tinggi mendorong pekerja mensubstitusikan waktu senggangnya untuk lebih banyak bekerja menambah konsumsi barang. Penambahan waktu tersebut dinamakan *substitution effect* dari kenaikan tingkat upah.

Lama kerja atau curahan jam kerja tenaga kerja dapat diukur dari pencurahan waktu yang dilakukan oleh seseorang untuk bekerja dalam rangka menghasilkan barang dan jasa. Para tenaga kerja menerima balasan berupa upah yang telah ditentukan perusahaan, namun biasanya upah dapat meningkat dipegaruhi dari lama kerja seseorang yang bersifat *continue* dalam perusahaan tersebut.

Upah seseorang dapat meningkat apabila tenaga kerja tersebut menjadi pegawai tetap dan dalam jangka waktu yang panjang. Lama kerja menunjukkan berapa lama seseorang bekerja pada masing-masing pekerjaan atau jabatan (Hafid,2014). Intensitas tenaga kerja yang dicurahkan oleh seseorang untuk pekerjaanya dipengaruhi oleh tingkat upah yang akan diperoleh dari pekerjaan tersebut, hal ini dijelaskan secara teoretis bahwa “semakin tinggi upah yang

mencapai pada titik tertentu maka semakin besar pula lama kerja yang bersedia dicurahkan seseorang. Oleh karena itu hubungan lama kerja dengan upah akan positif karena semakin lama seseorang mencurahkan waktu untuk bekerja sampai pada titik tertentu maka semakin besar pula output yang dihasilkan. Dengan kata lain upah yang didapat oleh pekerja nantinya akan bertambah.

Pendidikan jika dilihat secara umum bertujuan mengembangkan dan memperluas pengetahuan, pengalaman serta pengertian individu, pendidikan dapat diartikan sebagai usaha yang dilakukan oleh seseorang secara sadar terencana dengan tujuan agar dapat secara aktif mengembangkan potensi diri, kecerdasan, kepribadian, memiliki kekuatan spiritual keagamaan serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, keluarga, masyarakat, bangsa maupun negaranya.

Tingkat pendidikan diartikan sebagai suatu pendidikan formal yang dimiliki oleh karyawan secara umum bias dibedakan dalam tingkatan lulus sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas serta perguruan tinggi. Bila tingkat yang ditempuh tinggi maka diharapkan semakin tinggi pula kemauan kerjanya. Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa untuk melaksanakan pekerjaan dengan berhasil diperlukan adanya persyaratan tingkat pendidikan dan latihan tertentu. Di negara Indonesia sendiri pendidikan merupakan kebutuhan wajib bagi tiap individu agar dapat menaikan derajat kesejahteraan dan sosialnya.

Perusahaan menetapkan tingkat upah pada pekerjaannya pun berlandaskan tingkat pendidikan terakhir yang telah ditempu oleh pekerja karena semakin tingginya tingkat pendidikan berarti semakin luasnya pengetahuan

pekerja sehingga diharapkan dapat memajukan perusahaan. Menurut UU RI No 20 Tahun 2003 Jalur Pendidikan Dapat ditempuh menjadi 3 yaitu:

1. Pendidikan formal

   Pendidikan formal merupakan jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yaitu yang terdiri dari: pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Dalam jenjang pendidikan formal:1) Pendidikan dasar, merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang menengah. Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) maupun Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat, serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau dalam bentuk lain yang sederajat.2) Pendidikan menengah, ini merupakan lanjutan pendidikan dasar, pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Dapat berupa Sekolah Menengah Atas (SMA) maupun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) serta dalam bentuk lain yang sederajat.3) Pendidikan tinggi, merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, special serta doctor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

2. Pendidikan nonformal

   Jalur pendidikan ini berada diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Namun pendidikan non formal berada diselenggarkan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah maupun pelengkap pendidikan formalnya.

3. Pendidikan informal

> Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Hasil pendidikan yang informal diakui sama dengan pendidikan formal maupun nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.

Pendidikan memiliki fungsi dan tujuan nasional sesuai dengan Undang-Undang RI No.20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS yaitu bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta tanggung jawab.

Pekerja dibayar dengan tarif upah dasar atau bias dikatakan pekerja menerima kenaikan ketika keterampilannya berkembang. Maka hubungan tingkat pendidikan dengan tingkat upah dapat dilihat dari pekerja didasarkan pada tingkat ketrampilan, dan biasanya hal ini biasa dinilai dari tingkat pendidikan yang dimiliki. Rencana upah berdasarkan ketrampilan memperkirakan bagaimana pekerja mendapatkan kompensasi. Rencana upah ketrampilan kenaikan tingkat upah diberikan ketika pekerja menunjukkan keterampilan mereka dalam melakukan pekerjaan tertentu. Dan dalam hal ini tentu dipengaruhi oleh tingat pendidikan para tenaga kerjanya.

Ekonom dan filsuf Skotlandia Adam Smith, dalam The Wealth of Nations (1776), gagal mengajukan teori upah yang definitif, tetapi mengantisipasi beberapa teori yang dikembangkan oleh orang lain. Smith berpikir bahwa upah

ditentukan di pasar melalui hukum penawaran dan permintaan. Pekerja dan atasan secara alami akan mengikuti kepentingan mereka sendiri; tenaga kerja akan tertarik pada pekerjaan di mana tenaga kerja paling dibutuhkan, dan kondisi pekerjaan yang dihasilkan pada akhirnya akan menguntungkan seluruh masyarakat.

Smith membahas banyak elemen penting untuk pekerjaan, namun tidak memberikan analisis yang tepat tentang penawaran dan permintaan tenaga kerja, Smith juga tidak menenunnya ke dalam pola teoretis yang konsisten. Smith, menggambarkan perkembangan penting dalam teori modern dengan menyatakan bahwa kualitas keterampilan pekerja adalah penentu utama kemajuan ekonomi. Selain itu, Smith mengungkapkan bahwa pekerja perlu diberi kompensasi dengan kenaikan upah jika mereka harus menanggung biaya untuk memperoleh keterampilan baru, asumsi yang masih berlaku dalam teori modal manusia kontemporer.

Smith percaya bahwa dalam kasus negara maju, tingkat upah harus lebih tinggi daripada tingkat subsisten untuk memacu pertumbuhan penduduk, karena lebih banyak orang akan dibutuhkan untuk mengisi pekerjaan tambahan yang diciptakan oleh ekonomi yang berkembang. Smith (1776) mengatakan bahwa permintaan tenaga kerja tidak dapat meningkat kecuali sebanding dengan peningkatan dana yang ditujukan untuk pembayaran upah.

Teori ekonomi neoklasik memprediksi bahwa upah minimum yang lebih tinggi akan menyebabkan pekerjaan yang lebih rendah. Hal ini dapat terjadi karena dua alasan: pertama, karena upah minimum dapat memaksa perusahaan untuk menaikkan harga barang dan jasa mereka, dan konsumen atau pembeli internasional yang menghadapi harga yang lebih tinggi dapat mengurangi

permintaan mereka (yang disebut “efek skala”). Kedua, ketika pekerja berupah rendah menjadi lebih “mahal” karena upah minimum, perusahaan dapat memutuskan untuk mengganti beberapa dari mereka dengan lebih banyak mesin dan beberapa pekerja terampil untuk mengoperasikannya (“efek substitusi”).

Teori subsisten menekankan aspek penawaran pasar tenaga kerja sementara mengabaikan aspek permintaan. Mereka berpendapat bahwa perubahan dalam penawaran pekerja adalah kekuatan dasar yang mendorong upah riil ke minimum yang dibutuhkan untuk subsisten (yaitu, untuk kebutuhan dasar seperti makanan dan tempat tinggal).

Elemen teori subsisten muncul di The Wealth of Nations, Smith menulis bahwa upah yang dibayarkan kepada pekerja harus cukup untuk memungkinkan mereka hidup dan menghidupi keluarga mereka. Para ekonom klasik Inggris yang menggantikan Smith, seperti David Ricardo (1821) dan Thomas Malthus (1827), memiliki pandangan yang lebih pesimis. Ricardo menulis bahwa “harga alami” tenaga kerja hanyalah harga yang diperlukan untuk memungkinkan para pekerja bertahan hidup dan untuk melestarikan ras. Pernyataan Ricardo sesuai dengan teori populasi Malthus, yang menyatakan bahwa populasi menyesuaikan diri dengan sarana pendukungnya.

Para ahli teori subsistensi berpendapat bahwa harga pasar tenaga kerja tidak akan lama berubah dari harga alami: jika upah naik di atas subsisten, jumlah pekerja akan meningkat dan menurunkan tingkat upah; jika upah turun di bawah subsisten, jumlah pekerja akan berkurang dan mendorong tingkat upah naik. Dengan demikian, teori subsistensi tampaknya sesuai dengan fakta. Meskipun Ricardo mengatakan bahwa harga alami tenaga kerja tidak tetap (dapat berubah jika tingkat populasi dimoderasi dalam kaitannya dengan

pasokan makanan dan barang-barang lain yang diperlukan untuk mempertahankan tenaga kerja), Kesimpulan mereka yang tidak fleksibel bahwa upah akan selalu diturunkan membuat teori subsistensi mendapat nama "*iron law of wages*."

Ricardo menyatakan bahwa peningkatan modal akan menghasilkan peningkatan permintaan tenaga kerja. Pernyataan-pernyataan seperti ini menggambarkan teori dana-upah, yang menyatakan bahwa “dana” kekayaan yang telah ditentukan sebelumnya ada untuk pembayaran upah. Smith mendefinisikan dana teoretis ini sebagai surplus atau pendapatan yang dapat dibelanjakan yang dapat digunakan oleh orang kaya untuk mempekerjakan orang lain.

Ricardo memikirkannya dari segi modal, seperti makanan, pakaian, peralatan, bahan mentah, atau mesin yang dibutuhkan untuk kondisi kerja. Besarnya dana dapat berfluktuasi selama periode waktu tertentu, tetapi pada saat tertentu jumlahnya tetap, dan upah rata-rata dapat ditentukan hanya dengan membagi nilai dana ini dengan jumlah pekerja.

Terlepas dari komposisi dana, kesimpulan yang jelas adalah bahwa ketika dana besar dalam kaitannya dengan jumlah pekerja, upah akan tinggi. Ketika itu relatif kecil, upah akan rendah. Jika populasi meningkat terlalu cepat dalam kaitannya dengan makanan dan kebutuhan lainnya (seperti yang digariskan oleh Malthus), upah akan didorong ke tingkat subsisten. Oleh karena itu, menurut spekulasi, buruh akan diuntungkan jika mereka berkontribusi pada akumulasi kapital untuk memperbesar dana; jika mereka membuat tuntutan selangit pada pengusaha atau membentuk organisasi buruh yang mengurangi modal, mereka akan mengurangi ukuran dana, sehingga memaksa upah turun. Ini diikuti bahwa

undang-undang yang dirancang untuk menaikkan upah tidak akan berhasil, karena, dengan hanya menggunakan dana tetap, upah yang lebih tinggi untuk beberapa pekerja hanya dapat dimenangkan dengan mengorbankan pekerja lain.

Teori subsisten diterima secara umum selama 50 tahun oleh para ekonom seperti Nassau William Senior (1966) dan John Stuart Mill (1965). Setelah 1865 teori upah dana didiskreditkan oleh W.T. Thornton (1870), F.D. Longe (1866), dan Francis A. Walker (1876), semuanya berpendapat bahwa permintaan tenaga kerja tidak ditentukan oleh dana tetapi oleh permintaan konsumen akan produk. Lebih jauh lagi, para pendukung doktrin upah-dana tidak dapat membuktikan adanya jenis dana apa pun yang mempertahankan hubungan yang telah ditentukan sebelumnya dengan modal, dan mereka juga gagal untuk mengidentifikasi bagian mana dari kontribusi tenaga kerja untuk suatu produk yang sebenarnya dibayarkan dalam upah. Meskipun, jumlah total yang dibayarkan dalam upah tergantung pada sejumlah faktor, termasuk daya tawar buruh. Meskipun kritik yang jitu ini, bagaimanapun, teori upah-dana tetap berpengaruh sampai akhir abad ke-19.

Karl Marx menerima teori nilai kerja Ricardo (bahwa nilai suatu produk didasarkan pada kuantitas kerja yang digunakan untuk memproduksinya), tetapi ia menganut teori upah subsisten untuk alasan yang berbeda dari yang diberikan oleh para ekonom klasik Joseph (1923). Dalam perkiraan Marx, bukan tekanan populasi yang mendorong upah ke tingkat subsisten melainkan keberadaan sejumlah besar pekerja yang menganggur. Marx menyalahkan pengangguran pada kapitalis.

Marx memperbarui keyakinan Ricardo bahwa nilai tukar produk apa pun ditentukan oleh jam kerja yang diperlukan untuk membuatnya. Lebih jauh lagi, Marx berpendapat bahwa, dalam kapitalisme, kerja hanyalah sebuah komoditas: sebagai ganti kerja, seorang pekerja akan menerima upah subsisten. Akan tetapi, Marx berspekulasi bahwa pemilik modal dapat memaksa pekerja untuk menghabiskan lebih banyak waktu pada pekerjaan daripada yang diperlukan untuk memperoleh pendapatan subsisten ini, dan kelebihan produk atau nilai lebih yang diciptakan akan diklaim oleh pemiliknya.

Walker (1875) menyusun teori sisa upah di mana bagian tuan tanah, pemilik modal, dan pengusaha ditentukan secara independen dan dikurangi, sehingga menyisakan sisanya untuk tenaga kerja dalam bentuk upah. Akan tetapi, perlu dicatat bahwa faktor produksi mana pun dapat dipilih sebagai penuntut sisa dengan asumsi bahwa penentuan independen dapat dibuat untuk bagian dari faktor-faktor lain.

Teori tawar-menawar upah menyatakan bahwa upah, jam, dan kondisi kerja ditentukan oleh kekuatan tawar-menawar relatif dari para pihak dalam perjanjian. Smith mengisyaratkan teori seperti itu ketika dia mencatat bahwa pengusaha memiliki kekuatan tawar yang lebih besar daripada karyawan. Atasan berada dalam posisi yang lebih baik untuk menyatukan oposisi mereka terhadap tuntutan karyawan, dan atasan juga mampu menahan hilangnya pendapatan untuk jangka waktu yang lebih lama daripada yang bisa dilakukan karyawan. Ide ini dikembangkan sampai batas tertentu oleh John Davidson, yang mengusulkan dalam The Bargain Theory of Wages (1898) bahwa penentuan upah adalah proses yang sangat rumit yang melibatkan banyak pengaruh yang berinteraksi untuk membangun kekuatan tawar relatif para pihak.

Teori tawar-menawar berpendapat bahwa tidak ada satu faktor atau kombinasi faktor tunggal yang menentukan upah dan tidak ada satu tingkat pembayaran yang berlaku. Sebaliknya, ada kisaran tarif, yang mana saja mungkin ada secara bersamaan. Batas atas kisaran mewakili tingkat di mana atasan menolak untuk mempekerjakan pekerja tertentu. Tingkat ini dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk produktivitas pekerja, situasi persaingan, ukuran investasi, dan perkiraan pengusaha tentang kondisi bisnis di masa depan. Batas bawah kisaran menentukan tarif di bawah mana pekerja tidak akan menawarkan jasa mereka kepada atasan . Pengaruh pada tingkat ini termasuk undang-undang upah minimum, standar hidup pekerja, penilaian mereka tentang situasi pekerjaan, dan pengetahuan mereka tentang tingkat yang dibayarkan kepada orang lain. Baik batas atas maupun bawah tidak tetap, dan keduanya dapat bergerak ke atas atau ke bawah.

Teori tawar-menawar sangat menarik bagi organisasi buruh karena bertentangan dengan teori subsisten dan upah-dana, teori ini memberikan alasan yang sangat kuat untuk keberadaan serikat pekerja, sederhananya, kekuatan tawar serikat pekerja jauh lebih besar daripada individu. Akan tetapi, harus diperhatikan bahwa secara historis buruh mampu memperbaiki situasi mereka tanpa bantuan organisasi buruh. Hal ini menunjukkan bahwa faktor-faktor selain kekuatan tawar relatif para pihak pastilah bekerja. Meskipun teori tawar-menawar dapat menjelaskan tingkat upah dalam situasi jangka pendek (seperti adanya perbedaan upah tertentu), dalam jangka panjang teori tersebut gagal menjelaskan perubahan yang diamati pada tingkat upah rata-rata.

Teori produktivitas marjinal menyatakan bahwa pengusaha akan cenderung mempekerjakan pekerja dari jenis tertentu sampai kontribusi yang

diberikan pekerja (marjinal) terakhir ke nilai total produk sama dengan biaya tambahan yang dikeluarkan oleh perekrutan, dari satu pekerja lagi. Tingkat upah ditetapkan di pasar melalui permintaan, dan penawaran, jenis tenaga kerja yang dibutuhkan untuk pekerjaan itu (Hicks, 1932; Robinson, 1967). Kekuatan pasar yang kompetitif meyakinkan para pekerja bahwa mereka akan menerima upah yang sama dengan produk marjinal.

Teori daya beli upah didasarkan pada asumsi bahwa perubahan upah akan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap konsumsi karena upah merupakan persentase yang besar dari pendapatan nasional (Douglas, 1939). Oleh karena itu diasumsikan bahwa penurunan upah akan mengurangi konsumsi dan pada gilirannya akan mengurangi permintaan barang dan jasa, menyebabkan permintaan tenaga kerja turun.

Hasil aktual akan tergantung pada beberapa pertimbangan, terutama yang melibatkan harga (atau pertimbangan biaya hidup lainnya). Jika upah turun lebih cepat daripada harga, upah riil tenaga kerja akan berkurang drastis, konsumsi akan turun, dan pengangguran akan meningkat, kecuali pengeluaran total dipertahankan oleh peningkatan investasi, biasanya dalam bentuk pengeluaran pemerintah. Kemudian lagi, pengusaha mungkin melihat biaya upah yang lebih rendah (yang berkaitan dengan harga) sebagai tanda yang menggembirakan menuju keuntungan yang lebih besar, dalam hal ini mereka dapat meningkatkan investasi mereka dan mempekerjakan lebih banyak orang dengan tarif yang lebih rendah, sehingga mempertahankan atau bahkan meningkatkan pengeluaran total. dan ketenagakerjaan.

Jika pengusaha melihat penurunan upah dan harga sebagai indikasi penurunan lebih lanjut,maka investasi akan menurun. Dalam hal ini, total

pengeluaran dan penyerapan tenaga kerja akan menurun. Sebaliknya, jika upah turun lebih cepat daripada harga, upah riil tenaga kerja akan meningkat, dan konsumsi dapat meningkat. Jika investasi dipertahankan, total pengeluaran dalam dolar konstan akan meningkat, sehingga meningkatkan lapangan kerja. Namun, jika pengusaha melihat margin keuntungan yang menyusut sebagai sinyal yang bahaya, maka dapat mengurangi investasi dan, jika hasilnya adalah pengurangan pengeluaran total, maka lapangan kerja akan turun. Jika upah dan harga turun dalam jumlah yang sama, seharusnya tidak ada perubahan dalam konsumsi dan investasi, dan, dalam hal ini, pekerjaan akan tetap tidak berubah.

Analisis marginalis (penyempurnaan teori produktivitas marginal) dikenal sebagai teori *human capital* (modal manusia). Sejak itu menjadi sarana dominan untuk memahami bagaimana upah ditentukan. Ini menyatakan bahwa pendapatan di pasar tenaga kerja bergantung pada informasi dan keterampilan karyawan.

Penelitian kuantitatif selama tahun 1950-an dan 1960-an mengungkapkan bahwa pertumbuhan agregat dalam output telah melampaui pertumbuhan agregat dalam input standar tanah, tenaga kerja, dan modal. Ekonom yang mengeksplorasi fenomena ini menyarankan bahwa pertumbuhan pengetahuan dan keterampilan agregat di angkatan kerja, terutama yang disampaikan dalam pendidikan formal. Pada awal 1970-an, ekonom Amerika Theodore W. Schultz (1972) menciptakan istilah modal manusia untuk merujuk pada persediaan pengetahuan dan keterampilan produktif yang dimiliki oleh pekerja.

Teori modal manusia sebagian besar dibentuk oleh Gary S. Becker (1962), seorang mahasiswa Amerika dari Schultz yang memperlakukan modal manusia sebagai hasil dari proses investasi. Karena perolehan pengetahuan produktif itu,

(misalnya, siswa membayar biaya langsung dan melepaskan peluang untuk mendapatkan upah), Becker menyimpulkan bahwa aktor rasional akan melakukan investasi semacam itu hanya jika aliran manfaat masa depan yang diharapkan melebihi biaya jangka pendek yang terkait dengan perolehan pengetahuan. keterampilan. Oleh karena itu, investasi semacam itu memengaruhi "profil pendapatan usia" seseorang, lintasan pendapatan selama masa hidup seseorang. Mereka yang meninggalkan sekolah lebih awal, misalnya, memperoleh upah pasar rata-rata untuk tahun yang lebih lama daripada mereka yang memanfaatkan perpanjangan sekolah, tetapi mereka yang berada di kelompok terakhir biasanya memperoleh upah yang lebih tinggi selama masa hidup mereka. Namun, dalam kondisi tertentu, pendapatan seumur hidup total kedua kelompok bisa sama, meskipun mereka yang berpendidikan tinggi cenderung mendapatkan upah yang lebih tinggi ketika mereka bekerja.

Becker (1962) memperkenalkan perbedaan penting antara modal manusia "umum" (yang dihargai oleh semua calon pemberi kerja) dan modal manusia "khusus perusahaan" (yang melibatkan keterampilan dan pengetahuan yang memiliki nilai produktif hanya di satu perusahaan tertentu). Pendidikan formal menghasilkan modal manusia umum, sedangkan pelatihan di tempat kerja biasanya menghasilkan kedua jenis tersebut. Untuk memahami investasi dalam modal manusia oleh karyawan dan pengusaha,harus memperhatikan berbagai insentif yang terlibat. Dalam semua kasus, pengusaha enggan memberikan keterampilan umum, karena karyawan dapat menggunakannya di perusahaan lain. Sebaliknya, karyawan cenderung tidak berinvestasi dalam modal manusia khusus perusahaan tanpa jaminan kerja atau penggantian yang substansial. Isu-isu ini terletak di jantung banyak analisis kontemporer tentang hubungan kerja.

5. Pandangan Teoretis tentang Kredit perbankan

Menurut Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998, Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.Sedangkan, pengertian pembiayaan adalah penyedia uang atau tagihan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewijibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Adapun unsur-unsur di dalam pemberian suatu fasilitas kredit terdiri atas: 1). Kepercayaan. Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara interen maupun eksteren. 2). Kesepakatan. Yaitu adanya kesepakatan antara pemberi kredit dan penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya. 3). Jangka Waktu setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang. 4). Risiko yaitu adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Risiko inimenjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh risiko

yang tidak disengaja .5). Balas Jasa yang merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan bunga.

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai fungsi tertentu. Adapun fungsi utama dalam pemberian suatu kredit, sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan daya guna uang.

   Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang, maksudnya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit, uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh penerima kredit.

2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.

   Dalam uang yang diberikan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga suatu daerah yang kekurangan dana dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan dana dari daerah lainnya.

3. Untuk meningkatkan daya guna barang.

   Kredit yang diberikan oleh bank akan digunakan oleh (debitur) untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

4. Meningkatkan peredaran barang.

   Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah lainnya sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.

5. Sebagai alat stabilitas ekonomi.

   Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi, karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah

barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kemudian dapat pula kredit membantu dalam mengekspor barang dari dalam negeri ke luar negeri, sehingga meningkatkan devisa negara.

6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha.

   Bagi penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi nasabah yang memang modalnya pas-pasan.

7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan.

   Semakin banyak kredit yang disalurkan, akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut tentu membutuhkan tenaga kerja.

8. Untuk meningkatkan hubungan internasional.

   Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara penerima kredit dengan pemberi kredit. Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerja sama di bidang lainnya.

Secara umum jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi, antara lain:

1. Dilihat dari tujuan penggunaan

   a. Kredit Investasi

      Kredit investasi biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek atau pabrik baru. Contoh kredit investasi, misalnya : Untuk membangun pabrik atau membeli mesin-mesin untuk memproduksi.

   b. Kredit Modal Kerja

      Kredit Modal Kerja biasanya digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasional. Contoh kredit modal kerja, misalnya:

untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya -biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

2. Dilihat dari segi tujuan kredit

   a. Kredit konsumtif

      Kredit konsumtif biasanya diberikan secara pribadi. Kredit ini biasanya dipakai untuk membeli rumah atau merenovasi rumah dan untuk membeli mobil.

   b. Kredit produktif

      Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Kredit ini biasanya dipakai untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang.

   c. Kredit perdagangan

      Kredit yang digunakan untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini biasanya diberikan kepada supplier atau agen – agen perdagangan yang akan membeli dalam jumlah yang besar.

3. Dilihat dari segi jangka waktu

   a. Kredit Jangka Pendek

      Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

   b. Kredit Jangka Menengah

Jangka waktu kreditnya berkisaran atnara satu tahun sampai dengan tiga tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi.

c. Kredit Jangka Panjang

Merupakan kredit panjang waktu pengembaliannya di atas tiga tahun atau lima tahun. Biasanya dipakai untuk kredit perumahan.

Penilaian suatu kredit layak atau tidak untuk diberikan dapat dilakukan dengan menilai seluruh aspek yang ada. Adapun aspek-aspek yang dinilai antara lain sebagai berikut:

1. Aspek yuridis atau hukum

Yang kita nilai dalam aspek ini adalah masalah legalitas badan usaha serta izin-izin yang dimiliki perusahaan yang mengajukan kredit. Penilaian dimulai dengan akte pendirian perusahaan sehingga dapat diketahui. Kemudian juga diteliti keabsahannya adalah seperti :

a. Surat Izi Usaha Industri (SIUI) untuk sektor industri.
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk sektor perdagangan.
c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

2. Aspek pemasaran

Dalam aspek ini yang kita nilai adalah permintaan terhadap produk yang dihasilkan sekarang ini dan di masa yang akan datang prospeknya bagaimana. Yang perlu diteliti dalam aspek ini adalah

a. Pemasaran produknya minimal tiga bulan yang lalu atau tiga tahun yang lalu.
b. Rencana penjualan dan produksi minimal tiga bulan atau tiga tahun yang akan datang.

c. Peta kekuatan pesaing yang ada.

3. Aspek keuangan

Aspek yang dinilai adalah sumber-sumber dana yang dimiliki untuk membiayai usahanya dan bagaimana penggunaan dana tersebut. Di samping itu, hendaknya dibuatkan *cash flow* daripada keuangan perusahaan.

4. Aspek manajemen

Untuk menilai struktur organisasi perusahaan, sumber daya manusia yang dimiliki serta latar belakang pengalaman sumber daya manusianya. Pengalaman perusahaan dalam mengelola berbagai proyek yang ada dan pertimbangan lainnya.

5. Aspek sosial ekonomi

Menganalisis dampaknya terhadap perekonomian dan masyarakat umum seperti : meningkatkan ekspor barang; mengurangi pengangguran; dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Dalam pandangan Schumpeter (1982), bankir bukanlah pedagang tetapi produsen daya beli. “kredit pada dasarnya adalah penciptaan daya beli untuk tujuan mentransfernya ke pengusaha, tetapi bukan hanya transfer daya beli yang ada. Berbeda dengan alat tukar fungsi uang, penciptaan kredit menunjukkan dengan jelas fungsi kapitalistik uang, yaitu pentingnya untuk pengembangan industri.

Greenwald, Stiglitz, dan Weiss (1984) berpendapat bahwa yang penting untuk tingkat aktivitas ekonomi makro bukanlah persediaan uang (variabel kuantitas yang menjadi fokus monetarisme) atau tingkat tagihan (tingkat bunga yang pemerintah harus membayar obligasi jangka pendeknya, dan fokus kebijakan moneter baru-baru ini) tetapi ketersediaan kredit dan ketentuan di

mana kredit tersedia. Dengan demikian mereka mengkritik teori moneter standar dalam hal teori penentuan suku bunga pinjaman, relevansi tingkat tagihan, dan asumsi bahwa pasar kredit selalu jelas. Uang tidak diperlukan untuk melakukan transaksi, tetapi kredit. Bahkan jika uang diperlukan untuk transaksi, sebagian besar transaksi adalah pertukaran aset, dan tidak terkait langsung dengan produksi barang dan jasa; maka permintaan uang tidak hanya terkait dengan tingkat kegiatan ekonomi makro.

Greenwald, Stiglitz, dan Weiss, memberikan model sederhana yang menggambarkan perilaku bank, menunjukkan bagaimana pinjaman tidak hanya terkait dengan tingkat tagihan, tetapi dengan kekayaan bersih mereka, persepsi risiko mereka, portofolio aset yang ada, dan batasan yang diberikan oleh regulator. Mereka juga menjelaskan bagaimana bank menyesuaikan tidak hanya suku bunga pinjaman mereka, tetapi juga persyaratan kontrak lainnya sebagai respons terhadap perubahan variabel-variabel ini.

Keynes (1937a) menulis bahwa sistem perbankan merupakan penentu penting dari siklus fluktuasi, tetapi membahas perilaku bank hanya dalam istilah sugestif. Keynes menggambarkan perbankan sebagai aktivitas "ganda", yang melibatkan penciptaan kredit dan penyediaan likuiditas, dan menunjukkan bahwa secara umum, bank memegang posisi kunci dalam transisi dari tingkat aktivitas yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Alokasi kredit bank adalah jantung dari suklus fluktuasi.

Keynes mencirikan perbankan sebagai aktivitas ganda: bankir modern melakukan dua set layanan yang berbeda. Ia menyediakan pengganti uang negara dengan bertindak sebagai lembaga kliring, tetapi ia juga bertindak sebagai perantara untuk jenis pinjaman tertentu, menerima simpanan dari

masyarakat yang ia gunakan untuk membeli surat-surat berharga, atau dalam memberikan pinjaman untuk industri dan perdagangan. Bank menghadapi "dilema" dalam menggabungkan dua fungsi ini, untuk "pencapaian lengkap salah satu tugasnya kadang-kadang tidak sesuai dengan pencapaian lengkap yang lain".

6. Pandangan Teoretis tentang Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah merupakan alokasi anggaran yang disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya keberbagai sektor atau bidang dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat melalui bermacam-macam program. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pengeluaran pemerintah Indonesia secara garis besar dikelompokkan kedalam dua golongan yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan

Pengeluaran pemerintah adalah hal yang sangat penting karena menyangkut output yang dihasilkan untuk kepentingan hajat hidup orang banyak. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Pengeluaran yang dilakukan pemerintah menujukkan perannya dalam perekonomian dalam rangka mencapai kondisi masyarakat yang sejahtera. Pemerintah memiliki 4 peran yaitu: peran alokasi, berkaitan dengan peran pemerintah untuk mengalokasikan sumber daya ekonomi yang ada agar pemanfaatannya bisa optimal dan mendukung efisiensi produksi; peran distributif, berkaitan dengan peran pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya, kesempatan dan hasil- hasil ekonomi secara adil dan wajar; peran

stabilitatif, berkaitan dengan peran pemerintah dalam memelihara stabilitas perekonomian dan memulihkannya jika berada dalam keadaan equilibrium; dan peran dinamisatif, berkaitan dengan peran pemerintah dalam menggerakkan proses pembangunan ekonomi agar lebih cepat tumbuh, berkembang dan maju.

Pembiayaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah tidak terlepas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Keterlibatan pemerintah dalam perekonomian senantiasa meningkat dari tahun atau yang disebut dengan *Law Ever Increasing State Activity dari Wagner.* Besarnya pengeluaran pemerintah dapat mencerminkan besarnya peranan pemerintah dalam perekonomian.

Secara umum, fungsi atau peranan pemerintah dapat dikategorikan ke dalam fungsi alokasi distribusi dan stabilisasi. Fungsi alokasi berkaitan dengan peran pemerintah dalam menyediakan barang dan jasa yang tidak diproduksi oleh pihak swasta seperti barang dan jasa publik. Fungsi distribusi memberikan perbaikan taraf hidup kepada golongan masyarakat berpendapat rendah yang dapat dilakukan melalui politik dan kebijakan fiskal. Sedangkan fungsi stabilisasi bertujuan untuk menjaga stabilitas perekonomian seperti inflasi, kesempatan kerja dan pertumbuhan.

Rostow dan Musgrave (1999) melakukan pengamatan terhadap pembangunan ekonomi dibeberapa Negara. Model ini menghubungkan tahap-tahap pembangunan ekonomi dengan pengeluaran pemerintah yang terdiri dari tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan sarana dan prasarana seperti pendidikan, kesehatan, transportasi dan sebagainya. Di tahap menengah

peranan investasi pemerintah masih dibutuhkan namun investasi swasta semakin besar. Peran swasta yang semakin besar ini menyebabkan kegagalan pasar juga semakin besar yang pada akhirnya membuat pemerintah harus menyediakan barang dan jasa public lebih banyak dan lebih baik. Pada tahap lanjut, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana keaktivitas aktivitas sosial seperti program kesejahteraan hari tua, pelayanan kesehatan masyarakat dan sebagainya.

Teori Wagner (1977) bertitik tolak pada suatu teori yang disebut *organic theory of state*. Teori ini menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak. Menurut Wagner ada lima hal yang menyebabkan pengeluaran pemerintah selalu meningkat yaitu: tuntutan peningkatan perlindungan keamanan dan pertahanan; kenaikan tingkat pendapatan masyarakat; urbanisasi yang mengiringi pertumbuhan ekonomi; perkembangan demografi; dan ketidakefisienan birokrasi yang mengiringi perkembangan pemerintah.

Peacock dan Wiseman (1961) memandang bahwa pemerintah selalu berusaha untuk memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar, sehingga teori Peacock dan Wiseman merupakan dasar dari pemungutan suara. Mereka percaya bahwa masyarakat mempunyai tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Jadi masyarakat menyadari bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas pemerintah sehingga mereka memiliki kesediaan untuk membayar pajak. Tingkat toleransi pajak ini merupakan

kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pemungutan pajak secara semena-mena.

Pengeluaran pemerintah dapat dinilai dari empat segi yakni: pengeluaran pemerintah merupakan investasi untuk menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa yang akan datang; pengeluaran pemeritah langsung memberikan kesejahteraan bagi masyarakat; pengeluaran pemerintah merupakan pengeluaran yang akan datang; dan pengeluaran pemerintah merupakan sarana penyedia kesempatan kerja yang lebih banyak dan penyebaran daya beli yang lebih luas.

Ada tiga fase dalam pengeluaran pemerintah yakni: fase pertama, pengeluaran yang *self liquiditing* sebagian atau seluruhnya, artinya pengeluaran pemerintah mendapatkan pembayaran kembali dari masyarakat yang menerima jasa atau barang yang bersangkutan. Contohnya pengeluaran untuk jasa negara, pengeluaran untuk jasa-jasa perusahaan pemerintah atau untuk proyek-proyek produktif barang ekspor; pengeluaran yang reproduktif, artinya mewujudkan keuntungan keuntungan ekonomis bagi masyarakat, dimana dengan naiknya tingkat penghasilan dan sasaran pajak yang lain pada akhirnya akan menaikan penerimaan pemerintah. Misalnya, pemerintah menetapkan pajak progresif sehingga timbul redistribusi pendapatan untuk pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat.

Fase kedua, pengeluaran yang tidak *self liquiditing* maupun yang tidak produktif, yaitu pengeluaran yang langsung menambah kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Misalnya untuk bidang rekreasi, objek-objek pariwisata dan sebagainya. Sehingga ini dapat juga menaikkan penghasilan pemerintah terkait jasa.

Fase ketiga, pengeluaran yang secara langsung tidak produktif dan merupakan pemborosan. Misalnya untuk pembiayaan pertahanan atau perang meskipun pada saat pengeluaran terjadi penghasilan yang menerimanya akan naik; pengeluaran yang merupakan penghematan di masa yang akan datang. Misalnya pengeluaran untuk anak-anak yatim piatu. Jika hal ini tidak dijalankan sekarang, kebutuhan-kebutuhan pemeliharaan bagi mereka dimasa yang akan datang pasti akan lebih besar.

Tujuan pembahasan pengeluaran publik adalah untuk menemukan makna pengeluaran untuk kehidupan masyarakat. Menurut Henry C Adams (Adams, 1895), titik awal pembahasan pengeluaran pemerintah adalah pendapatan sosial yang mana pendapatan publik menjadi bagiannya, dan karena pengeluaran individu dibatasi oleh pendapatan yang dinikmatinya, maka negara dibatasi oleh proporsi pendapatan sosial. Pendapatan yang menurut kondisi politik, sosial dan industri yang ada, dapat dengan tepat ditempatkan. Distribusi dana publik diantara berbagai lini pelayanan yang dilakukan oleh negara, juga secara umum ditentukan oleh pertimbangan yang sama dengan mempengaruhi pengeluaran individu

B. Keterkaitan Antarvariabel

1. Hubungan Teoritis Inflasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Adanya pengaruh positif dan signifikan antara tingkat inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Samanta (1994) bahwa tingkat inflasi mempengaruhi penerimaan lapangan kerja di Kanada. Namun hasil berbeda diperoleh Vermeulen (2017) bahwa penerapan penargetan inflasi yang terlalu ketat menghambat pertumbuhan lapangan kerja di

Afrika Selatan. Hasil penelitian Smith (1994) menunjukkan bahwa peningkatan inflasi berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Inflasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses dimana terjadi kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Inflasi memiliki tingkat yang berbeda dari satu periode ke periode lainnya dan berbeda pula dari satu negara ke negara lainnya (Sadono Sukirno, 2001:15). Boediono (2008:155) juga mendefinisikan inflasi merupakan kecendrungan dari harga-harga untuk naik secara umum dan terus menerus, akan tetapi kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut sebagai inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas atau mengakibatkan kenaikan kepada sebagian besar dari harga-harga barang lainnya.

Menurut Nanga (2005:248) inflasi yang terjadi pada perekonomian di suatu daerah memiliki beberapa dampak dan akibat yang diantaranya adalah inflasi dapat menyebabkan perubahan-perubahan output dan tenaga kerja, dengan cara memotivasi perusahaan untuk memproduksi lebih atau kurang dari yang telah dilakukannya tergantung intensitasi inflasi yang terjadi. Apabila inflasi yang terjadi dalam perekonomian masih tergolong ringan, perusahaaan berusaha akan menambah jumlah output atau produksi karena inflasi yang ringan dapat mendorong semangat kerja produsen dari naiknya harga yang mana masih dapat dijangkau oleh produsen. Keinginan perusahaan untuk menambah output tentu juga dibarengi oleh pertambahan faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja. Pada kondisi tersebut permintaan tenaga kerja akan meningkat, yang selanjutnya meningkatkan penyerapan tenaga kerja yang ada dan pada akhirnya mendorong laju perekonomian melalui peningkatan pendapatan nasional. Sebaliknya, apabila inflasi yang terjadi tergolong berat

(hyper inflation) maka perusahaan akan mengurangi jumlah ouput akibat tidak terbelinya faktor-faktor produksi dan perusahaan juga akan mengurangi jumlah penggunaan tenaga kerja sehingga penyerapan tenaga kerja semakin berkurang dan pengangguran bertambah

Penelitian yang dilakukan Novianti (2013) mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja sektor industri di Sumatera Utara dikatakan bahwa variabel inflasi memiliki pengaruh negatif terhadap permintaan tenaga kerja sektor industri di Sumatera Utara. Ini berarti semakin bertambahnya tingkat inflasi berarti semakin berkurang penyerapan tenaga kerjanya. Begitu juga sebaliknya, semakin berkurangnya tingkat inflasi maka semakin bertambah tenaga kerja yang mampu diserap. Haug dan King (2011) menjelaskan bahwa inflasi yang terjadi di Amerika Serikat periode 1952-2010 memiliki hubungan positif terhadap jumlah pengangguran. Penelitian lainnya yang dilakukan Beyer dan Farmer (2007) di Amerika Serikat periode 1970-1999 mengidentifikasikan bahwa ada hubungan yang positif antara inflasi terhadap pengangguran kemudian dilanjutkan oleh Berensten, Menzio dan Wright (2009) yang meneliti pada periode 1955-2005 yang juga mengatakan terdapat hubungan positif antara inflasi terhadap pengangguran. Kesimpulannya, teori dan penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa inflasi memiliki hubungan negatif terhadap jumlah penyerapan tenaga kerja. Apabila tingkat inflasi naik maka jumlah penyerapan tenaga kerja akan berkurang dan begitu juga sebaliknya.

2. Hubungan Teoritis Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja.

Adanya pengaruh dan hubungan antara upah minimum dan penyerapan tenaga kerja telah banyak ditemukan oleh beberapa peneliti diantaranya Dickson (2019), Holtemöller (2020), dan Perugini (2016) dari aspek sudut pandang teori

ekonomi dan teori upah. Adanya pengaruh antara upah dan penyerapan tenaga kerja dapat terwujud selama faktor regulasi, *job security*, dan permintaan agregat akan tenaga kerja dapat berlangsung secara positif. Sedangkan hasil penelitian Clemens (2019), Caliendo, dkk (2018), dan Bauducco (2018) upah yang optimal dan faktor remunerasi memberikan dampak nyata yang menjembatani antara upah dan penyerapan tenaga kerja yang positif .

Lebih dalam, Borowczyk-Martins dkk (2017), dan Pengcheng Du, dkk (2020) bahwa faktor diskriminasi dari segi pengupahan akan memberikan dampak negatif terhadap penyerapan tenaga kerja. Berbanding terbalik dengan studi dari Lee Donghoon, dkk (2010), Säve-Söderbergh (2019), dan Schober & Winter-Ebmer (2011), menemukan bahwa perbedaan antara upah berdasarkan gender tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja.

Aspek teori pengupahan dan asimetrik teori menyatakan bahwa faktor *loss aversion* seorang pekerja dan pengupahan menjadi hal yang kontradiksi saling berlawanan, Dickson (2019), Su (2019) menyatakan bahwa faktor *loss aversion* (menghindari kerugian) dan asimetris informasi menjadi faktor yang menjembatani hubungan antara upah dan penyerapan tenaga kerja, *loss aversion person* yang rendah dan tingginya tingkat asimetri informasi personal seorang tenaga kerja mengabaikan peran upah yang minimum diterimanya. Diperjelas di penelitian Yamamoto et al (2019) yang menyatakan faktor asimetri informasi terhadap penyerapan tenaga kerja di tenggarai oleh perbedaan level pendidikan. Faktor pendidikan merupakan sub-faktor yang berperan penting dalam hal penyerapan tenaga kerja selain upah.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyebutkan bahwa upah adalah hak pekerja/buruh yang

diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarga atas suatu pekerjaan dan/jasa yang telah atau akan dilakukan. Sadono Sukirno (2002:353) mendefiniskan upah yaitu pembayaran yang diperoleh berbagai bentuk jasa yang disediakan dan diberikan oleh pengusaha kepada tenaga kerja. Upah ditentukan dengan melibatkan evaluasi dari kontribusi karyawan sebagai bentuk penghargaan baik langsung maupun tidak langsung sesuai dengan kemampuan dari organisasi dan peraturan hukum yang berlaku (Fopuhunda, et al, 20011).

Penyerapan tenaga kerja berkaitan dengan jumlah tenaga yang diminta perusahaan atau instansi tertentu. Menurut Sumarsono (2003: 106) perubahan tingkat upah akan mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi perusahaan. Gindling dan Terrell (2006) dalam penelitian yang dilakukannya mengatakan bahwa tingkat upah memiliki pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja, dimana setiap 10 persen kenaikan upah minimum terjadi penurunan pekerja di masing-masing sektor sebesar 1,09 persen. Menurut Kuncoro (2002), kenaikan upah akan mengakibatkan penurunan kuantitas tenaga kerja yang diminta. Apabila tingkat upah naik sedangkan harga input lain tetap, berarti harga tenaga kerja relatif mahal dari input lain. Situasi ini mendorong pengusaha untuk mengurangi penggunaan tenaga kerja yang relatif mahal dengan input input lain yang harga relatifnya lebih murah guna mempertahankan keuntungan yang maksimum.

Rini (2013) di dalam penelitiannya, kenaikan upah minimum akan mengakibatkan berkurangnya lapangan kerja yang juga akan berimbas pada

berkurangnya jumlah penyerapan tenaga kerja. Magruder (2013) dan Kholifah Anggrainy (2013) juga mengatakan bahwa upah minimum memiliki hubungan negatif terhadap permintaan tenaga kerja, dengan kata lain temuan tersebut menjelaskan bahwa kenaikan upah minimum akan mengurangi jumlah permintaan tenaga kerja sehingga jumlah penyerapan tenaga kerja juga berkurang.

Penelitian yang dilakukan Rizal Azaini (2014) menyatakan bahwa bertambahnya nilai upah bisa menyebabkan meningkatkan kehidupan layak seorang pekerja, tetapi jika peningkatan upah yang ditetapkan terlalu tinggi yang tidak disertai dengan peningkatan produksi kerja akan mendorong perusahaan untuk melakukan pengurangan terhadap penggunaan tenaga kerja dengan menurunkan produksi dan menggunakan teknologi padat modal. Hal ini dilakukan karena beban yang terlalu tinggi yang ditanggung perusahaan akibat bertambahnya nilai upah. Sumarsosno (2003, dalam Fadliilah dan Atmanti, 2012) menjelaskan bahwa tingkat upah akan mempengaruhi biaya produksi. Naiknya tingkat upah akan meningkatkan biaya produksi perusahaan yang selanjutnya berdampak pada meningkatnya harga per unit barang yang diproduksi. Dengan kondisi tersebut, konsumen akan memberikan respon apabila terjadi kenaikan harga barang, konsumen akan mengurangi konsumsi atau bahkan tidak mau membeli barang yang bersangkutan. Akibatnya banyak barang atau produk yang tidak terjual maka produsen harus menurunkan jumlah produksinya. Turunnya jumlah produksi mengakibatkan berkurangnya tenaga kerja yang dibutuhkan, itu berarti jumlah penyerapan tenaga kerja juga akan berkurang. Upah minimum yang turun memiliki manfaat yang baik terhadap Negara karena dalam jangka panjang pengangguran dapat berkurang (Danziger, 2009). Kesimpulannya, teori

dan hasil penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa upah minimum memiliki hubungan yang negatif terhadap penyerapan tenaga kerja. Apabila upah minimum naik maka penyerapan tenaga kerja akan berkurang dan begitu juga sebaliknya

3. Hubungan Teoritis Kredit Perbankan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Hubungan antara kredit bank terhadap penyerapan tenaga kerja misalnya pada studi yang diungkap oleh Benmelech (2019) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kredit bank dan penyerapan tenaga kerja dari aspek sudut pandang teori ekonomi dengan mengaitkan hubungan antara kredit, pungutan pajak yang bersifat pemaksasan, kompensasi jangka pendek dan utang luar negeri. Hal tersebut juga sejalan yang telah diungkapkan oleh Cornille (2019), Gómez (2019), dan Haltenhof (2014). Akan tetapi, pendapat yang berbeda dikemukakan oleh Degryse (2019), dan Linghui Han (2013) mereka mengungkapkan bahwa kredit bank tidak memiliki dampak signifikan terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja.

Elnopembri (2006) meneliti “Analisis faktor – faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja industri kecil di Kabupaten Tanah Datar Sumatra Barat”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja industri kecil di Kabupaten Tanah Datar. Data yang digunakan adalah data sekunder runtut waktu (time series) dari tahun 1990 sampai dengan tahun 2004 berupa jumlah tenaga kerja industri kecil, Upah Minimum Regional (UMR), tingkat suku bunga investasi kredit Bank Pemerintah Daerah, tingkat suku bunga kredit investasi bank persero pemerintah di daerah, dan nilai produksi industri kecil di Kabupaten Tanah Datar. Data jumlah tenaga kerja dan nilai produksi industri kecil diperoleh dari Dinas

Koperindagtam Kabupaten Tanah Datar, data upah minimum regional diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Datar, sedangkan data tingkat suku bunga kredit menurut kelompok bank diperoleh dari laporan Bank Indonesia. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian adalah analisis regresi berganda yang ditaksir dengan menggunakan metode kuadrat terkecil (Ordinary Least Square, OLS) dalam bentuk semi-log. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa upah minimum regional memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja industri kecil. Tingkat suku bunga kredit investasi Bank Pemerintah Daerah dan Bank Persero Pemerintah di daerah sama-sama memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja industri kecil artinya peningkatan suku bunga kredit hanya akan mengakibatkan turunnya permintaan tenaga kerja industri kecil. Nilai produksi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja industri kecil. Ekspansi yang dilakukan industri kecil dengan menciptakan akses pasar akan mendorong peningkatan produksi sehingga berdampak terciptanya lapangan kerja baru

4. Hubungan Teoritis Pengeluaran Pemerintah terhadap Penyerapan Penyerapan Tenaga Kerja

Adanya pengaruh antara pengeluaran pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja telah digaungkan oleh beberapa penelitian terdahulu misalnya pada penelitian Witt (2004), dan Polo (2008) yang membenarkan fakta bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari sektor pariwisata antara pengeluaran pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja yang dijembatani oleh level pendidikan serta di kebijakan pemerintah

Sektor militer memberikan fakta yang sebaliknya, diungkapkan oleh Dunne, (1990), Alptekin, (2012), dan Manamperi (2016), menemukan fakta yang

terbalik dimana keduanya memandang bahwa pengeluaran pemerintah dari aspek militer dan pertahanan tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja dari sektor pertahanan militer di negara maju, akan tetapi berpengaruh signifikan antara pengeluaran pemerintah di sektor militer terhadap pertumbuhan ekonomi bagi wilayah negara berkembang.

Keynes juga berpendapat bahwa dalam sistem pasar bebas penggunaan tenaga kerja penuh tidak selalu tercipta sehingga perlu dilakukan usaha dan kebijakan pemerintah untuk menciptakan penggunaan tenaga kerja penuh dan pertumbuhan ekonomi yang teguh (Sukirno, 2004:7). Salah bentuk campur tangan yang dapat dilakukan adalah dengan menjalankan kebijakan fiskal. Dalam hal ini Keynes mengisyaratkan kebijakan fiskal yang ekspansif melalui pengurangan pajak dan penambahan pengeluaran pemerintah (government expenditure

indikator-indikator ekonomi yang mempengaruhi tingkat penyerapan tenaga kerja antara lain pengeluaran pemerintah dan investasi swasta (Rachim, 2013). Pengeluaran pemerintah yang dipergunakan untuk membeli barang dan jasa akan mendorong terciptanya lapangan kerja. Pemerintah dalam upaya menyediakan barang publik secara tidak langsung akan membuka kesempatan kerja. Lapangan kerja yang tersedia akibat dari aktivitas pemerintah akan dipengaruhi oleh jenis pengeluaran. Adapun kebijakan pemerintah dalam usahanya untuk menanggulangi masalah pengangguran melalui kebijakan fiskal, dalam hal ini pengeluaran pemerintah yang ekspansif tampaknya belum mendatangkan hasil yang signifikan, pengeluaran pemerintah yang setiap tahunnya mengalami kenaikan ternyata diiringi pula oleh bertambahnya jumlah pengangguran. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya

pengeluaran pemerintah yang tidak tepat sasaran, misalnya selama ini pengeluaran pembangunan lebih banyak ditujukan untuk membiayai proyek-proyek yang padat modal atau misalnya, untuk merestrukturisasi permodalan perusahaan-perusahaan konglomerat seperti bank-bank swasta atau juga karena sistem birokrasi pemerintah yang kurang efisien yang menyebabkan terjadinya penyelewengan-penyelewengan serta penyalahgunaan anggaran, sehingga pengeluaran pemerintah menjadi tidak tepat sasaran dan jumlah pengangguran terbuka setiap tahunnya bertambah.

5. Hubungan Teoritis Produk Domestik Bruto terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja misalnya pada studi yang diungkap oleh Yugang He (2018) yang menyatakan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi ada kausalitas dua arah. Hal tersebut juga sejalan yang telah diungkapkan oleh Rawski (1979). Hasil penelitian Olamade (2020) penerapan hukum Okun ke Nigeria dengan elastisitas lapangan kerja dari pertumbuhan PDB terlalu kecil untuk menghasilkan pertumbuhan lapangan kerja yang terlihat. Hasil penelitian Purnomo & Istiqomah(2019) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi akan mengurangi kemiskinan hanya jika pertumbuhan ekonomi mampu menciptakan kesempatan kerja.

Data Produk Domestik Bruto (PDB) baik itu atas harga berlaku maupun atas dasar harga konstan merupakan indikator penting yang digunakan untuk mengetahui kondisi perekonomian suatu negara dalam suatu periode. PDB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha pada

suatu Negara tertentu dan dapat juga dikatakan sebagai jumlah dari nilai barang dan jasa akhir (neto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi (BPS, 2013). Produk domestik merupakan semua barang dan jasa yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang berlangsung, tanpa memperdulikan asal dan kepemilikan faktor produksi dari penduduk tersebut ataupun tidak..

Mankiw (2006:248) menjelaskan, hukum okun adalah relasi negatif antara pengangguran dan GNP. Hukum okun merupakan pengingat bahwa faktor-faktor yang menentukan siklus bisnis pada jangka pendek sangat berbeda dengan faktor-faktor yang membentuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Hukum Okun (Okun's law) merupakan hubungan negatif antara pengangguran dan GNP Riil, yang mengacu pada penurunan dalam pengangguran sebesar 1 persen dikaitkan dengan pertumbuhan tambahan dalam GNP Riil yang mendekati 2 persen. Dengan kata lain, PDB berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Peningkatan jumlah PDB akan berpengaruh pada peningkatan penyerapan tenaga kerja, begitu juga sebaliknya penurunan jumlah PDB akan berpengaruh pada penurunan penyerapan tenaga kerja.

Penelitian tentang hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran (penyerapan tenaga kerja) dimulai pada tahun 1950-an. Harrod (1939) dan Domar (1947) dalam (Arico, 2003; 398) adalah dua orang yang memberikan kontribusi mengenai topik ini. Namun, selanjutnya Arico, (2003; 399) melakukan pendekatan dengan menggunakan model Solow (1956). Kemudian model ini menjadi perdebatan dalam cabang pertumbuhan ekonomi baru dalam hubungannya dengan tingkat pengangguran. Setelah sekitar 40 tahun model ini kembali menjadi perhatian kalangan ekonom, sebagian besar disebabkan oleh publikasi Pissarides '(1990) model, yang secara luas dianggap sebagai salah

satu upaya pertama untuk menjelaskan hubungan pengangguran dalam pertumbuhan ekonomi (Arico, 2003, hal. 423). Mengacu pada standar dalam model pertumbuhan neoklasik, Pissarides (1990) membentuk hubungan antara pertumbuhan dan pengangguran melalui keuntungan dan biaya perekrutan. Dalam kondisi ekonomi yang normal, tingkat pertumbuhan ekonomi memiliki dua efek yaitu kenaikan atau penurunan laba masa depan dan kenaikan atau penurunan biaya perekrutan masa depan. Dengan demikian, menghadapi peningkatan tingkat pertumbuhan ekonomi, pilihan yang optimal perusahaan akan mempekerjakan jumlah tenaga kerja pada saat ini (dengan membuka lowongan baru) akan menghemat biaya perekrutan masa depan. Dengan kata lain, tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi berarti mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan lowongan pekerjaan. Aghion (1994) mengidentifikasi proses ini sebagai efek kapitalisasi. Sedangkan pada periode sebelumnya, Arthur Okun (1929-1979) dalam (Samuelson et al, 2004; 58) menyatakan bahwa untuk setiap penurunan 2 persen GNP yang berhubungan dengan GNP potensial, angka pengangguran meningkat sekitar 1 (satu) persen. Hukum Okun menyediakan hubungan yang sangat penting antara pasar output dan pasar tenaga kerja, yang menggambarkan asosiasi antara pergerakan jangka pendek pada GDP riil dan perubahan angka pengangguran (Samuelson et al, 2004; 58).

Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian Fields (1988), bahwa secara keseluruhan, pertumbuhan lapangan kerja sejalan dengan pertumbuhan angkatan kerja, campuran pekerjaan meningkat, upah riil naik, dan ketidaksetaraan relatif dan kemiskinan absolut turun. Tetapi selama krisis ekonomi 1980-1982, ketika pendapatan per kapita riil anjlok, kondisi pasar

tenaga kerja memburuk secara nyata: pengangguran berlipat ganda, komposisi pekerjaan memburuk, dan upah riil turun 40%.Pertumbuhan, kondisi pasar tenaga kerja, dan distribusi pendapatan.

C. Penelitian Terdahulu

Hubungan antar variabel yang dikembangkan untuk kemudian mengantar studi ini dalam membangun kerangka konseptual dan pengajuan hipotesis. Secara garis besar hubungan antar variabel merujuk pada tiga *path-analysis* utama yakni analisis jalur yang menjelaskan tentang studi terkait pengaruh inflasi terhadap penyerapan tenaga kerja dari aspek Kurva Phillips. Kemudian di jalur kedua menjelaskan tentang hubungan upah terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja dari aspek teori pengupahan, teori inflasi dan teori asimetric. Sedangkan di analisis jalur yang ketiga menjelaskan tentang pengaruh antara kredit bank terhadap pertumbuhan ekonomi dari sudut pandang teori pertumbuhan, teori ekonomi dan teori manajemen dan pengaruh kredit bank terhadap penyerapan tenaga kerja dari sudut pandang teori ekonomi. Pada analisis jalur yang keempat, menjelaskan hubungan atau pengaruh antara pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja. Kemudian di jalur kelima pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja dari berbagai sudut pandang (teori keynesian, teori ekonomi, teori equilibrium, teori kompensasi, teori evolusi dan teori entrepreneurship). Untuk lebih jelasnya disajikan dalam Lampiran 1.